

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN: UJI PEMBERLAKUAN HIPOTESIS KUZNET DI
INDONESIA (2004-2023)**

(SKRIPSI)

Oleh:

**AQIL USMAN HERMAWAN
2111021042**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: UJI PEMBERLAKUAN HIPOTESIS KUZNET DI INDONESIA (2004-2023)

OLEH

AQIL USMAN HERMAWAN

Ketimpangan pendapatan merupakan isu krusial dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Hipotesis Kuznets serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia pada periode 2004–2023. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji Chow dan Hausman, dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model. Variabel yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kuadratnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sementara kuadratnya berpengaruh negatif, mengonfirmasi terbuktinya kurva U-terbalik Hipotesis Kuznets. IPM menurunkan ketimpangan, sedangkan PMTB cenderung memperlebar kesenjangan. TPT dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Temuan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan distribusi investasi adil dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Hipotesis U-terbalik Kuznet. Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY: TESTING THE VALIDITY OF THE KUZNETS HYPOTHESIS IN INDONESIA (2004–2023)

BY

AQIL USMAN HERMAWAN

Income inequality is a crucial issue in the context of sustainable economic development in Indonesia. This study aims to test the Kuznets Hypothesis and analyze the factors influencing income distribution inequality in Indonesia during the 2004–2023 period. The method employed is panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM), selected based on the Chow and Hausman tests, with classical assumption testing to ensure model validity. The variables analyzed include Gross Regional Domestic Product (GRDP) and its square, Human Development Index (HDI), Gross Fixed Capital Formation (GFCF), Open Unemployment Rate (OUR), and Poverty Rate. The results show that GRDP has a positive effect on inequality, while its square has a negative effect, confirming the existence of the inverted U-curve as proposed in the Kuznets Hypothesis. HDI reduces inequality, whereas GFCF tends to widen the income gap. Meanwhile, unemployment and poverty do not have a statistically significant effect. These findings highlight the importance of equitable economic development, inclusive growth, and fair investment distribution in reducing income inequality in Indonesia.

Keywords: *Income Distribution Inequality, Inverted U-shaped Kuznets Hypothesis, Economic Growth.*

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN: UJI PEMBERLAKUAN HIPOTESIS KUZNET DI
INDONESIA (2004-2023)**

Oleh:

AQIL USMAN HERMAWAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi
Pendapatan: Uji Pemberlakuan Hipotesis Kuznet di
Indonesia (2004-2023)

Nama Mahasiswa

: *Aqil Usman Hermawan*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2111021042

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Komisi Pembimbing

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.

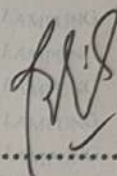
NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

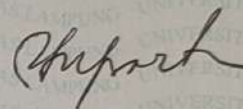
Ketua

: Dr. Arivina Ratih, Y.T, S.E., M.M.



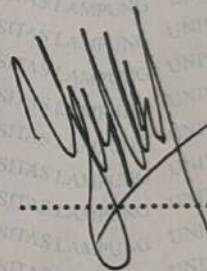
Penguji I

: Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.



Penguji II

: Prayudha Ananta, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqil Usman Hermawan

NPM : 2111021042

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Uji Pemberlakuan Hipotesis Kuznet di Indonesia (2004-2023)" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Aqil Usman Hermawan

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aqil Usman Hermawan dilahirkan di Pringsewu pada 19 Juni 2002. Penulis lahir sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Sofyan Usman dan Ibu Tati Piska Wati. Penulis memulai jenjang pendidikan formalnya di TK Kartika II, Kota Bandar Lampung, pada tahun 2007 dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Beringin Raya, Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 hingga lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan berhasil menamatkannya pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, di mana penulis lulus pada tahun 2020. Setiap jenjang pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan semangat belajar penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai organisasi, seperti UKPM-F Pilar Ekonomi FEB, UKM-F KSPM FEB, dan UKM-U Penelitian. Pada tahun 2024 penulis mengikuti program magang mandiri di BAPPEDA Provinsi Lampung pada bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2024 di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji selama kurang lebih 40 hari. Selain berorganisasi, penulis mengikuti berbagai seminar dan kegiatan relawan baik dari intra maupun eksternal kampus.

MOTTO

”Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji, Bahwa
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

"There is some good in this world. And it's worth fighting for."

(Samwise Gamgee)

Non Regitur Ab Aliquo Alterius Non Sit, Qui Potest Esse

-Aku Tidak Dikendalikan Oleh Siapapun, Jangan Bergantung Pada Orang Lain Kalau
Engkau Bisa Dari Dirimu Sendiri-

"Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies."

(Andy Dufresne)

Jika Kamu Mau Maju, Jangan Takut. Jika Kamu Takut, Jangan Maju. Pada Akhirnya,
Semua Keputusan Ada Di Tangan Kamu.

(Aqil Usman Hermawan)

”Natus Vincere”

-Terlahir Untuk Menang-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya serta tidak lupa sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati, aku persembahkan tulisan ini kepada :

Orang Tua Tercinta

Mami dan Papi

Terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Mami dan Papi atas cinta, kasih sayang, serta segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidup saya. Setiap lelah yang kalian rasakan, setiap doa yang kalian panjatkan, serta setiap nasihat dan pelajaran hidup yang kalian tanamkan, menjadi bekal yang amat berharga dalam perjalanan hidup saya hingga saat ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda, serta melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan dalam keluarga kita. Doa saya, semoga kelak kita dipertemukan kembali dalam kebahagiaan abadi di Surga-Nya.

Teruntuk Abang Penulis, Deswan Firlyan.

Terima kasih telah menjadi saudara yang selalu mendukung dan selalu dapat diandalkan.

Almamater tercinta,

Terima kasih untuk seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang senantiasa memberikan ilmu, membimbing, memberikan nasihat dan memberikan motivasi yang berharga untuk penulis. Terima kasih atas segala jasa dan ilmu yang kalian berikan.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Uji Pemberlakuan Hipotesis Kuznet di Indonesia (2004-2023)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, mendorong untuk terus semangat, membimbing dengan sangat baik dan memberikan ilmu dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan di waktu yang tepat.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E.,M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji dan Dosen Pembahas yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran, masukan, dan nasihatnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

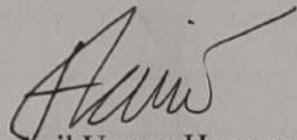
5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji dan Dosen Pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukannya yang membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi.
6. Bapak Imam Awaluddin, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, motivasi, doa, dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan inspirasi kepada penulis selama masa perkuliahan, serta para staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses skripsi ini.
8. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sofyan Usman dan Ibu Tati Piska Wati yang dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan doa senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Segala dukungan dan cinta yang telah diberikan menjadi pijakan penting dalam perjalanan ini. Semoga setiap kebaikan yang telah ditanamkan dibalas dengan limpahan pahala dan keberkahan oleh Allah SWT, serta senantiasa diridhai-Nya. Aamiin.
9. Teruntuk Adin, Deswan Firlyan, terima kasih telah menjadi sosok panutan yang tidak hanya memberi arahan, tetapi juga memberi semangat, doa, dan kepercayaan yang begitu besar.
10. Sahabat-sahabat terbaik di masa perkuliahan, Gita, Yosevan, Yulian, terima kasih atas kebersamaan yang penuh warna dan cerita yang telah kita lalui bersama. Setiap momen dan kisah kehidupan yang kalian bagikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis, meninggalkan kenangan indah yang akan selalu dikenang dengan hangat.
11. KKN Desa Mukti Karya, Mesuji 2024, Naufal, Sabila, Widya, Adel, Arifah dan Alvi yang telah mengukir kisah kekeluargaan yang tak terlupakan selama 40 hari.
12. Orang-orang baik yang pernah ditemui penulis selama masa perkuliahan baik intra maupun eksternal kampus.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua semangat, doa dan dukungannya. Semoga hal baik akan selalu menyertai kalian.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga segala doa, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis berbalas kebaikan dari Allah SWT, Aamiin ya rabbal alaamiin.

Bandar lampung, 04 Juni 2025

Penulis



Aqil Usman Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan.....	23
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	34
2.1.4 Investasi	36
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	39
2.1.6 Tingkat Kemiskinan.....	42
2.2 Hubungan Antar Variabel	43
2.2.1 Hubungan PDRB Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	43
2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	44
2.2.3 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	45
2.2.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	45

2.2.5 Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi	
Pendapatan	46
2.3 Tinjauan Empiris	47
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
2.4 Kerangka Pemikiran	53
2.5 Hipotesis Penelitian.....	54
III. METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	55
3.2 Jenis dan Sumber Data	56
3.3 Definisi Operasional Variabel	57
3.4 Spesifikasi Model	59
3.5 Metode Analisis.....	64
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	73
4.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	74
4.3 Uji Asumsi Klasik	76
4.4 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel.....	79
4.5 Pengujian Hipotesis.....	81
4.6 Uji Keberlakuan Hipotesis U-Terbalik Kuznet di Indonesia	86
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
<u>5.1 Kesimpulan</u>	103
<u>5.1 Saran</u>	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	47
3.1 Variabel, Satuan, dan Sumber Data	56
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
4.2 Hasil Uji Chow.....	74
4.3 Hasil Uji Hausman	75
4.4 Hasil Uji Multikolineritas	78
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
4.6 Hasil Estimasi Regresi Model fixed effect.....	79
4.7 Hasil Uji t-statistik LOGPDRB Perkapita.....	82
4.8 Hasil Uji t-statistik LOGPDRB Perkapita Kuadrat.....	82
4.9 Hasil Uji t-statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83
4.10 Hasil Uji t-statistik Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	83
4.11 Hasil Uji t-statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	84
4.12 Hasil Uji t-statistik Tingkat Kemiskinan (TK).....	84
4.13 Hasil Uji F-statistik	85
4.14 Hasil Pengujian Hipotesis Kuznet.....	87

DAFTAR GAMBAR

1.1 Rasio Gini Indonesia Tahun 2004-2023	3
1.2 Rasio Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023	5
1.3 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2004-2023 (Ribu Rupiah)	7
1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023	9
1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023 (Juta Rupiah)	13
1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004- 2023 (Persen)	16
1.7 Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023 (Persen)	18
2.1 Kurva Kuznet	25
2.2 Kurva Lorenz	28
2.3 Kerangka Pemikiran	53
4.1 Hasil Uji Normalitas	77
4.3 Kurva U-terbalik Kuznet	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan isu krusial dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara berbagai kelompok masyarakat, yang dapat berdampak signifikan pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (A'laa & Sutikno, 2019). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, meskipun perekonomian telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Akibatnya, kelompok berpenghasilan tinggi semakin kaya, sementara kelompok berpenghasilan rendah semakin tertinggal. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin serta pada kualitas hidup masyarakat (Tambunan, 2001). Ketimpangan pendapatan tidak hanya meningkatkan kemiskinan, tetapi juga memicu sejumlah konsekuensi negatif lainnya, seperti ketidakmerataan distribusi aset, melemahnya stabilitas sosial, serta ketidakefisienan ekonomi (Todaro & Smith, 2004).

Ketimpangan ini semakin terlihat dalam pembangunan daerah, di mana sektor-sektor utama terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu (Yasmin & Syofyan, 2024). Menurut Ike et al. (2021), faktor-faktor seperti investasi dalam modal fisik, modal manusia, dan infrastruktur memiliki peran penting dalam menentukan tingkat ketimpangan antar wilayah. Dampak ketimpangan ini dapat bersifat negatif, misalnya dengan menghambat investasi, meningkatkan

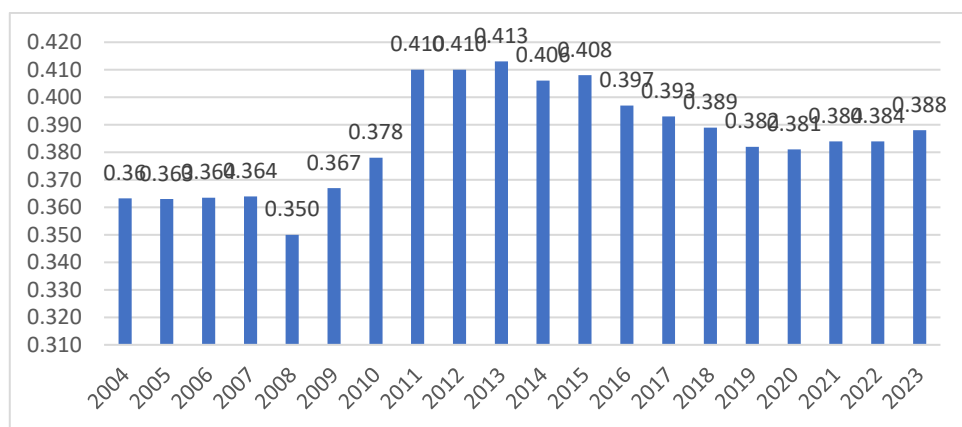
kemiskinan, dan menurunkan produktivitas di wilayah tertentu (Rasulong, 2024). Namun, ketimpangan juga dapat membawa dampak positif dalam hal mendorong wilayah yang kurang berkembang untuk berkompetisi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran yang lebih baik (Dogan & Cafri, 2016).

Teori Kuznets (1955) menjelaskan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan sering kali berkorelasi dengan kenaikan pendapatan per kapita hingga mencapai titik tertentu. Setelah melewati titik tersebut, ketimpangan pendapatan cenderung menurun, membentuk pola kurva U terbalik. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting dalam fenomena ini, termasuk akumulasi modal pada kelompok berpenghasilan tinggi dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri modern (Shinetiara & Rozae, 2023). Kuznets juga mengemukakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, setelah ekonomi mencapai tahap kematangan, ketimpangan ini akan berkurang seiring dengan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Navarro et al., 2020).

Melihat dinamika tersebut, hipotesis Kuznets masih memiliki relevansi yang signifikan dan penting untuk diteliti dalam konteks modern, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi telah mengubah pola pertumbuhan ekonomi, yang dapat memengaruhi struktur ketimpangan pendapatan (Syamhari, 2023). Selain itu, perkembangan faktor sosial dan politik, seperti perubahan kebijakan redistribusi dan akses terhadap pendidikan serta infrastruktur digital, juga memengaruhi pola distribusi pendapatan (Hutagalung et al., 2024). Uji empiris terhadap hipotesis Kuznets di Indonesia menjadi penting untuk mengetahui apakah pola ketimpangan yang terbentuk masih mengikuti kurva U terbalik seperti yang dikemukakan Kuznets atau justru mengalami pergeseran (Wardhana, 2020). Hal ini tidak hanya

berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan ketimpangan pendapatan, tetapi juga menyediakan landasan kebijakan bagi pemerintah untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pengujian hipotesis ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar diiringi dengan penurunan ketimpangan pendapatan pada tahap tertentu, atau jika ada faktor-faktor baru yang perlu diperhatikan dalam konteks Indonesia saat ini.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Rasio di Indonesia telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (BPS, 2023). Ketimpangan yang rendah biasanya ditunjukkan oleh Gini Rasio di bawah 0.4, nilai antara 0.4 dan 0.5 menunjukkan ketimpangan sedang, dan nilai di atas 0.5 mencerminkan ketimpangan yang tinggi (S. Dai et al., 2023). Walaupun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan redistribusi pendapatan dan program kesejahteraan sosial, hasil yang dicapai masih belum maksimal dalam menurunkan ketimpangan, seperti yang tercermin dalam pergerakan nilai Gini Rasio dari waktu ke waktu.



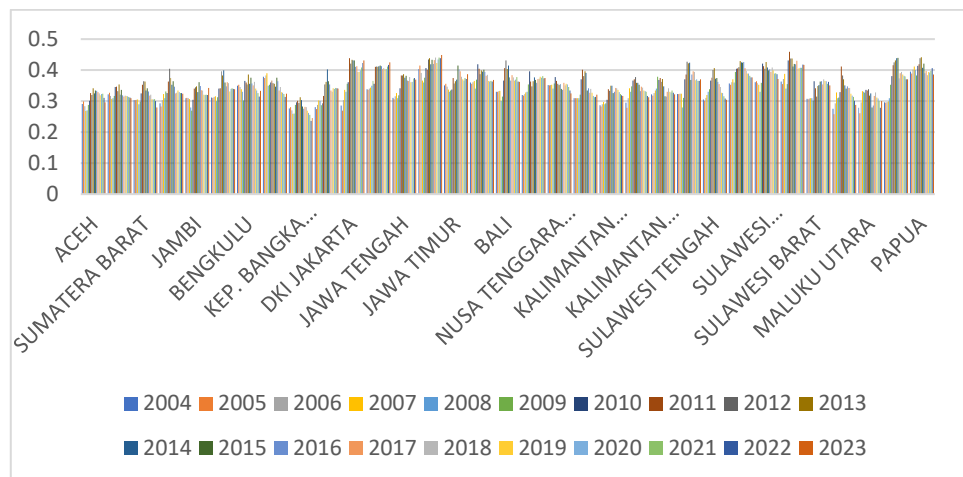
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2024)

Gambar 1.1 Rasio Gini Indonesia Tahun 2004-2023

Gambar 1.1 menunjukkan tren ketimpangan pendapatan di Indonesia dari 2004 hingga 2023. Pada 2004 hingga 2007, Rasio Gini berada pada kisaran 0.360 hingga 0.364, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif stabil. Namun, pada 2008, terjadi penurunan signifikan ke angka 0.350, yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut. Selanjutnya, Rasio Gini mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai 0.378 pada 2010 dan melonjak ke angka 0.410 pada 2011 dan 2012, bahkan mencapai puncaknya pada 2013 dengan nilai 0.413, menandakan ketimpangan yang sangat tinggi. Setelah 2013, ketimpangan mulai menurun secara perlahan, dengan Rasio Gini turun ke angka 0.408 pada 2015 dan terus menurun hingga mencapai titik terendah selama dekade terakhir, yaitu 0.381 pada 2020. Namun, sejak 2021, Rasio Gini kembali mengalami kenaikan bertahap, dari 0.384 menjadi 0.388 pada 2023.

Tren ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam distribusi pendapatan setelah 2013, tantangan ketimpangan masih tetap ada, terutama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Masalah distribusi pendapatan mencakup dua aspek utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan dalam menangani kedua aspek ini tercermin dari distribusi pendapatan yang seimbang di berbagai wilayah serta penurunan Rasio Gini antar wilayah (Permana, 2016). Namun, penurunan Rasio Gini nasional belum mampu memenuhi kedua tujuan tersebut. Hal ini didukung oleh data pada Gambar 1.1 dan 1.2 yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan belum tercapai antar wilayah, dan masih terdapat banyak daerah dengan Rasio Gini di atas rata-rata nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.2 Rasio Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023.

Gambar 1.2 menunjukkan variasi ketimpangan pendapatan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia dari 2004 hingga 2023. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua memiliki Rasio Gini tinggi sepanjang periode ini, dengan DI Yogyakarta mencapai 0.449 pada 2023, menunjukkan ketimpangan yang masih tinggi. Beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Maluku, mengalami penurunan ketimpangan, misalnya Maluku yang turun dari 0.34 pada 2015 menjadi 0.288 pada 2023, mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan. Di sisi lain, provinsi seperti Papua Barat mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada 2016 namun kembali meningkat dan stabil di sekitar 0.37 pada 2023. Sementara itu, provinsi seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Utara menunjukkan stabilitas relatif, tanpa perubahan besar pada tingkat ketimpangan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang terfokus untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang bervariasi di setiap provinsi.

Menurut Haikal (2021), terdapat beberapa faktor utama yang memicu ketimpangan di wilayah Indonesia. Pertama, ketimpangan muncul karena pembangunan yang tidak merata, di mana aktivitas ekonomi cenderung terpusat di beberapa daerah, membuat wilayah lain tertinggal dalam aspek

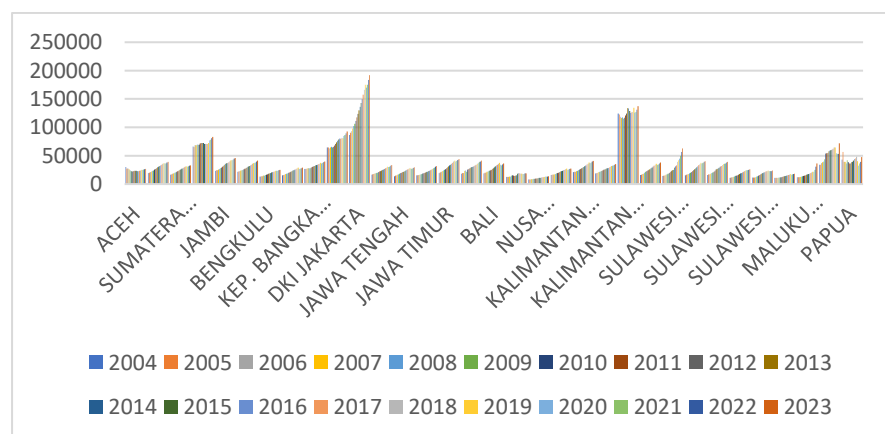
pembangunan. Kedua, distribusi modal yang tidak merata juga berperan, karena daerah yang menerima investasi lebih sedikit akan tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang memperoleh investasi lebih besar, sehingga memicu ketimpangan antar wilayah. Ketiga, perbedaan kondisi demografis antar wilayah, terutama dalam hal pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan faktor lainnya, turut memperburuk ketimpangan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut berkontribusi pada ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan ini telah lama menjadi perhatian di Indonesia dan dapat dilihat melalui kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. PDRB menggambarkan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu (Sasana, 2001), dan PDRB per kapita kerap dijadikan indikator pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu daerah, semakin besar pula potensi pendapatan yang dihasilkan, karena hal ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Thamrin, 2001). Dengan kata lain, daerah yang memiliki PDRB per kapita tinggi cenderung memiliki masyarakat dengan pendapatan yang lebih besar, sehingga jika pendapatan antar wilayah tinggi dan merata, ketimpangan pendapatan pun akan berkurang.

Dalam penelitian ini, variabel PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis kuznet di Indonesia, PDRB per kapita digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, sementara PDRB per kapita kuadrat ditambahkan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Studi Melikhova dan Cizek (2014) juga menggunakan variabel PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan faktor sosial terhadap ketimpangan pendapatan, menemukan bahwa kurva U-terbalik berlaku di negara-negara dengan kontribusi sosial yang rendah.

Temuan serupa diperoleh dalam penelitian Huang et al., (2012) di Amerika Serikat pada periode 1917-2007, di mana hipotesis Kuznets terbukti melalui hubungan non-linear antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar bagi pengujian hipotesis Kuznets dalam konteks Indonesia, yang relevan dalam mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi ketimpangan antar wilayah.

Secara keseluruhan, antara tahun 2004 hingga 2023, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh daerah-daerah di Jawa dan Sumatera, yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita nasional. Namun, kontribusi ini juga menunjukkan adanya tantangan ekonomi di wilayah tersebut, termasuk ketimpangan pendapatan yang tercermin dari tingginya nilai PDRB per kapita. Sebuah studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2007) mencatat bahwa kondisi yang serupa juga terlihat pada periode 2001–2005, di mana kontribusi PDRB dari Jawa mencapai sekitar 60%, sementara Sumatera menyumbang antara 21.9% hingga 22.5%. Selama periode penelitian tersebut, ketimpangan juga terindikasi dari nilai PDRB per kapita di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2004-2023 (Ribu Rupiah).

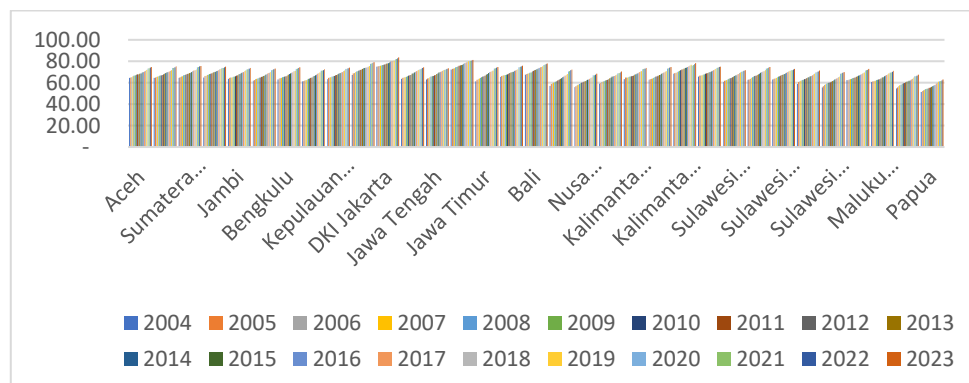
Data dalam gambar 1.3 menunjukkan tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2023, dengan mayoritas provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Namun, terdapat anomali pada tahun 2020, di mana beberapa provinsi mengalami penurunan atau perlambatan pertumbuhan, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19. Provinsi-provinsi yang bergantung pada sektor pariwisata dan sektor tertentu yang rentan terhadap pembatasan sosial, seperti Bali dan Papua, menunjukkan penurunan PDRB per kapita yang signifikan di tahun tersebut. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, banyak provinsi mulai menunjukkan pemulihan ekonomi, dengan beberapa mengalami lonjakan besar, contohnya Sulawesi Tengah.

Berdasarkan nilai PDRB per kapita, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau menempati posisi teratas, yang mengindikasikan aktivitas ekonomi yang besar dan keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Di sisi lain, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Maluku memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar-provinsi. Kesenjangan ini menggambarkan distribusi ekonomi yang masih belum merata di Indonesia, di mana provinsi dengan skala ekonomi yang besar dan kaya sumber daya cenderung jauh lebih unggul dibandingkan provinsi yang ekonominya lebih kecil atau yang memiliki keterbatasan sektor unggulan.

Menurut Hindun et al. (2019), salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata (Navarro et al. 2020). Dalam konteks ini, IPM menjadi indikator yang sangat penting karena mencerminkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup), pendidikan (dilihat dari rata-rata lama

sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (yang tercermin dari daya beli masyarakat). IPM memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas penduduk. Daerah yang memiliki IPM tinggi cenderung memiliki penduduk yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah umumnya menghadapi tantangan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan. Oleh karena itu, perbedaan tingkat IPM antar daerah turut memperbesar kesenjangan pendapatan, yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Ketimpangan IPM antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam kemampuan ekonomi masyarakat. Daerah yang memiliki IPM tinggi akan terus berkembang dan menikmati pertumbuhan pendapatan yang lebih besar, sementara daerah dengan IPM rendah tertinggal secara ekonomi. Hal inilah yang kemudian memperkuat ketimpangan pendapatan antar wilayah, karena akses terhadap pelayanan dasar yang memengaruhi IPM—seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja—tidak tersebar merata di seluruh daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2023, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.4, mengungkapkan adanya tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Provinsi dengan IPM tertinggi secara konsisten adalah DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, sedangkan Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan IPM terendah. Perbedaan tinggi rendahnya IPM ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur. Meskipun beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan percepatan pertumbuhan IPM yang cukup signifikan, kesenjangan tersebut masih menjadi tantangan pembangunan nasional yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih terarah dan inklusif di wilayah dengan capaian IPM yang rendah. Dengan demikian, perbedaan tingkat IPM secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.

Pentingnya upaya memperbaiki kesenjangan pembangunan manusia tercermin dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh Navarro et al. (2020). Penelitian ini menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Menggunakan variabel IPM dan demokrasi sebagai variabel kontrol, penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara OECD. Artinya, peningkatan IPM di suatu wilayah terbukti dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung hipotesis Kuznets, di mana ketimpangan pendapatan di negara-negara OECD cenderung menurun seiring dengan peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan hidup yang merata. Penelitian oleh Voto & Ngepah (2024) mengungkap bahwa meningkatnya indeks pembangunan manusia secara

signifikan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di berbagai negara. Temuan serupa juga disampaikan oleh Smith & Lee (2021), yang menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Pelajaran ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat adanya kesenjangan indeks pembangunan manusia antar provinsi yang signifikan.

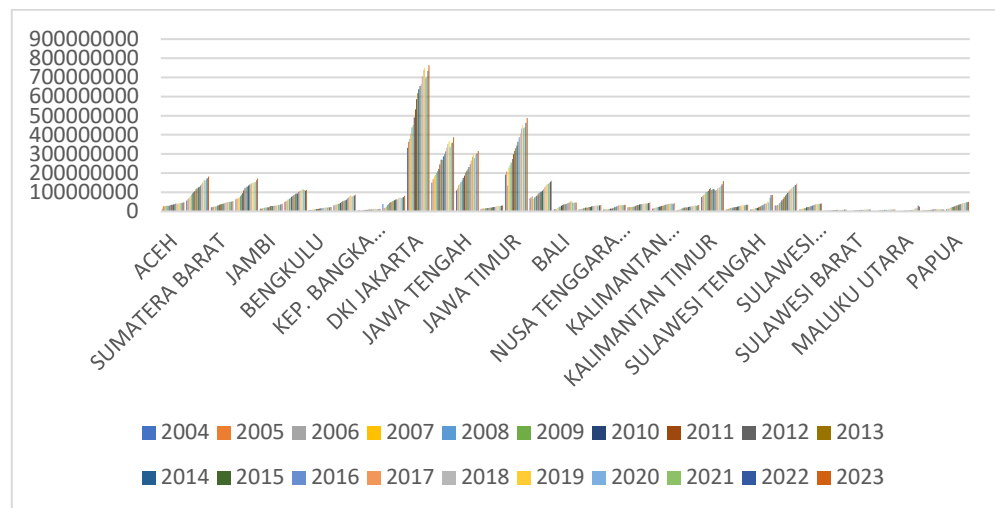
Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh ketimpangan investasi antar daerah. Menurut Wibowo & Pangestuty (2023), investasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pendapatan karena distribusi investasi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah, yang pada gilirannya berpengaruh pada distribusi pendapatan. Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar yang dikemukakan oleh Jhingan (2004), investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan pendapatan dan peningkatan kemampuan produksi dengan menambah modal. Adipuryanti & Sudibia (2015) menyatakan bahwa kegiatan investasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penyusutan modal dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional di bawah kapasitas yang ideal. Sementara itu, peningkatan investasi di beberapa wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Penelitian Maesza et al. (2022) menambahkan bahwa investasi yang terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu akan memperbesar kesenjangan pendapatan, daerah yang menerima aliran investasi yang lebih besar dapat mengembangkan infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor ekonomi produktif, yang meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sementara itu, daerah yang tidak mendapatkan cukup investasi tidak dapat berkembang secara optimal, sehingga pendapatan di daerah tersebut tetap rendah (Wijayanti & Aisyah, 2022). Lebih lanjut, Huang et al. (2020) mengungkapkan bahwa

ketimpangan distribusi investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur, memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika investasi hanya terfokus pada wilayah perkotaan, daerah pedesaan yang minim investasi akan tertinggal dalam hal peluang ekonomi, memperdalam kesenjangan antara kedua wilayah tersebut.

Salah satu aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu investasi, variabel investasi direpresentasikan melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran, yang mencerminkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB mencakup pengeluaran untuk barang modal berumur panjang seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, jalan, bandara, serta mesin dan peralatan. Tingginya PMTB menunjukkan peningkatan investasi fisik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Dalam konteks ketimpangan pendapatan, PMTB memegang peranan penting karena wilayah dengan tingkat PMTB yang tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap peluang ekonomi, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sebaliknya, rendahnya PMTB di daerah tertinggal dapat memperlebar kesenjangan ekonomi karena terbatasnya investasi yang masuk, minimnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, distribusi investasi yang tercermin melalui PMTB perlu diarahkan secara proporsional dan berkeadilan antarwilayah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023 (Juta Rupiah).

Berdasarkan Gambar 1.5, Pembentukan Modal Tetap Bruto di berbagai daerah selama tahun penelitian (2004-2023) menunjukkan fluktuasi dan penyebaran yang tidak merata. Nilai investasi tertinggi yaitu sebagian besar provinsi di pulau jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara provinsi yang lain seperti Papua dan Maluku menunjukkan nilai investasi rerata terendah. Ketimpangan dalam distribusi investasi ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Indonesia. Kurangnya optimalisasi investasi di daerah-daerah yang masih tertinggal di Indonesia berpotensi menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan antar wilayah. Jika situasi ini terus dibiarkan, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dapat semakin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah yang kurang berkembang guna mendorong pemerataan.

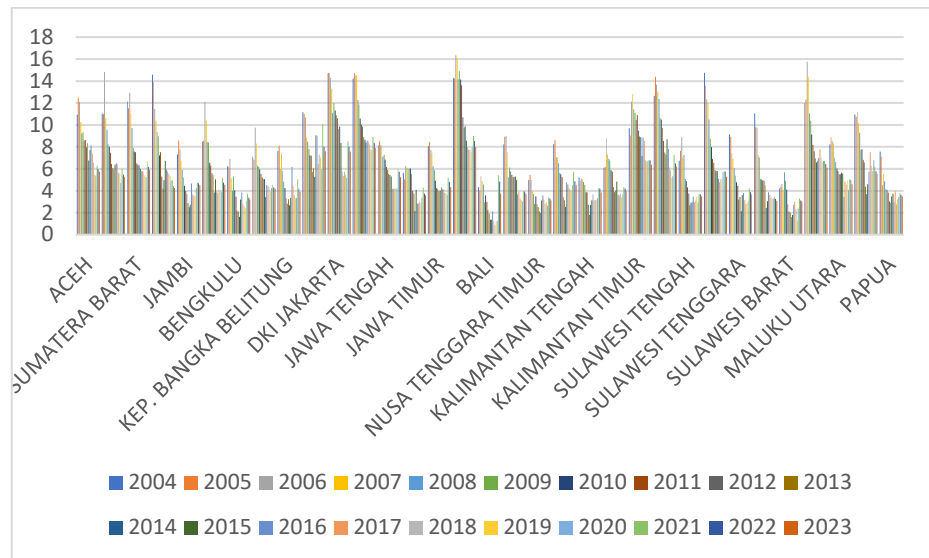
Peran investasi dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan juga didukung oleh berbagai temuan penelitian. Penelitian Dogan & Cafri (2016)

menunjukkan bahwa investasi, sebagai variabel kontrol dalam menguji hipotesis Kuznets di negara-negara OECD, memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan mendukung keberlakuan hipotesis Kuznets. Menurut penelitian (Febriyani & Anis, 2022), investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan pengaruh positif. Maesza et al. (2022) juga menemukan pengaruh positif signifikan investasi terhadap ketimpangan pendapatan dalam periode 2010-2019. Sebaliknya, Pramesti & Yasa (2019) menunjukkan hasil berbeda di Kabupaten Klungkung, Bali, pada periode 2003-2017, di mana investasi berdampak negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Harahap (2022) menemukan hasil serupa, yaitu adanya hubungan negatif antara investasi dan Indeks Gini di Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Faktor lain yang signifikan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Sjafrizal (2012), TPT dapat menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. TPT merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki sumber pendapatan. Kondisi ini menurunkan daya beli masyarakat dan menekan tingkat kesejahteraan. Akibatnya, kelompok tenaga kerja berpendapatan rendah menjadi lebih rentan karena upah yang mereka terima semakin tertekan, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan pendapatan (Wulandari & Rahmawati, 2022). Dampak ini terlihat jelas pada distribusi pendapatan, di mana individu yang menganggur atau bekerja secara tidak tetap cenderung memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Selain dampak langsung pada individu, tingginya TPT menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, kondisi pengangguran masih menjadi tantangan serius. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan tanda-tanda positif, angka pengangguran tetap tinggi, terutama di kalangan lulusan pendidikan tinggi dan generasi muda (Hutagalung et al., 2024). Banyak individu yang terjebak dalam pekerjaan informal atau tidak tetap, yang membuat pendapatan mereka tidak stabil. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan yang lebih luas. Selain dampak langsung pada individu, tingginya TPT menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat mengurangi angka pengangguran dan, pada gilirannya, mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Data dalam gambar 1.6 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara konsisten memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari 10 persen pada 2020-2021. Hal ini mencerminkan besarnya persaingan kerja di wilayah perkotaan. Sebaliknya, wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua memiliki tingkat pengangguran lebih rendah, di bawah 4 persen, yang mengindikasikan keterbatasan pasar kerja atau kurangnya industri di daerah tersebut. Beberapa provinsi mengalami peningkatan tingkat pengangguran selama pandemi COVID-19, terutama pada 2020, seperti Kepulauan Riau dan Bali yang mengalami lonjakan signifikan. Namun, setelah pandemi, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan penurunan pengangguran secara bertahap. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbedaan kondisi ketenagakerjaan antara wilayah barat dan timur Indonesia, yang dapat berkontribusi pada ketimpangan distribusi pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023 (Persen).

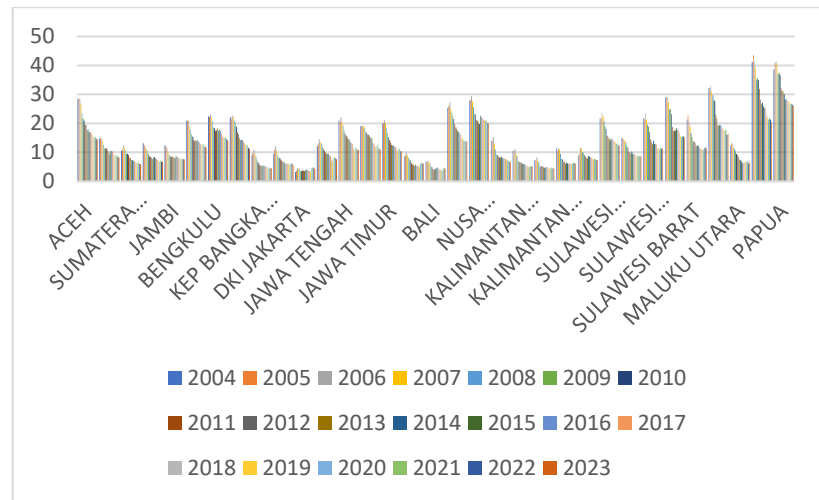
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki relevansi penting dalam menguji Hipotesis Kuznets, terutama karena pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri yang lebih produktif. Penelitian Oczki et al., (2017) yang meneliti determinan ketimpangan pendapatan dan menguji hipotesis U-terbalik Kuznets di Uni Eropa, menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel kontrol untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, mendukung berlakunya Hipotesis Kuznets di Uni Eropa.

Pada tahap awal pembangunan, sebagian besar tenaga kerja mungkin belum memiliki keterampilan yang sesuai untuk sektor-sektor baru, yang

menyebabkan tingginya TPT dan memperburuk ketimpangan pendapatan (Kusumo, 2013). Dengan kata lain, pada fase awal pertumbuhan ekonomi, TPT yang tinggi berpotensi memperlebar ketimpangan. Namun, pada tahap selanjutnya, menurut Hipotesis Kuznets, seiring dengan peningkatan investasi, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja, TPT diharapkan menurun karena semakin banyak individu mendapatkan kesempatan kerja di sektor industri dan jasa. Penurunan TPT ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena semakin banyak tenaga kerja yang memperoleh penghasilan tetap dan stabil. Dalam konteks ini, analisis TPT menjadi penting untuk mengamati apakah Indonesia pada periode tertentu menunjukkan pola yang mendukung Hipotesis Kuznets, yaitu peningkatan ketimpangan pada awal pembangunan yang kemudian menurun setelah mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Salah satu indikator penting yang turut memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan adalah kemiskinan yang ditimbulkan dari ketimpangan itu sendiri. Ketimpangan dan kemiskinan merupakan dua fenomena ekonomi yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Ketika distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata, kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan semakin tertinggal, sehingga memperbesar potensi munculnya kemiskinan struktural. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan bukan hanya mencerminkan perbedaan kesejahteraan antarkelompok, tetapi juga menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung dari kondisi kemiskinan yang berkepanjangan. Menurut Latumaerissa (2015:97), kemiskinan adalah suatu keadaan di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses terhadap pangan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang memadai, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan bentuk

ketidakberdayaan ekonomi yang luas, yang dalam banyak kasus diperparah oleh ketimpangan pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 data diolah

Gambar 1.7 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2023 (Persen).

Berdasarkan Gambar 1.7, Persentase Penduduk Miskin di berbagai daerah selama tahun penelitian (2004-2023) menunjukkan tren penurunan. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan spasial yang cukup mencolok antara wilayah barat dan timur Indonesia. Provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur konsisten mencatat tingkat kemiskinan terendah, sementara provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi sepanjang periode tersebut. Beberapa provinsi bahkan mengalami perlambatan penurunan atau stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih merata dan mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap wilayah.

Barber (dalam Sugiyarto, 2015) menjelaskan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan bersifat pragmatis, yakni bahwa

kemiskinan dapat memperburuk ketimpangan, sementara ketimpangan pendapatan juga dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari kemiskinan. Dalam konteks ini, hubungan keduanya bersifat negatif dan saling memperkuat. Ketimpangan yang tinggi mengakibatkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat atas, sedangkan kelompok bawah tetap tertinggal dan semakin sulit mengejar ketertinggalannya. Secara spasial, ketimpangan pendapatan juga menyebabkan disparitas antarwilayah. Wilayah-wilayah yang mengalami tingkat kemiskinan tinggi seringkali juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi. Akibatnya, daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya kesulitan untuk berkembang, tetapi juga semakin jauh tertinggal dibandingkan daerah maju. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Ketimpangan pendapatan yang melebar berpotensi menurunkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan juga harus memperhatikan strategi pengentasan kemiskinan secara komprehensif.

Tingkat kemiskinan memiliki relevansi penting dalam menguji Hipotesis Kuznets, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat karena sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang lebih dahulu masuk ke sektor modern. Sementara itu, kelompok miskin yang masih tertinggal di sektor tradisional akan mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih produktif, sehingga tingkat kemiskinan tetap tinggi. Penelitian oleh Raza et al., (2021) yang mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di negara berkembang

menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol, dan hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada fase awal pembangunan. Temuan ini mendukung eksistensi kurva U terbalik sebagaimana dikemukakan oleh Hipotesis Kuznets, di mana penurunan kemiskinan baru terjadi pada fase lanjutan saat pertumbuhan ekonomi mulai terdistribusi lebih merata.

Meskipun ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia telah menjadi perhatian dalam berbagai studi sebelumnya, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit membuktikan keberlakuan Hipotesis Kuznets di Indonesia. Selain itu, sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada pendekatan time series dengan cakupan waktu yang relatif pendek, serta belum secara optimal memanfaatkan pendekatan data panel yang mampu menangkap dinamika ketimpangan antarwilayah dan antarwaktu secara lebih komprehensif. Selain itu, pengujian terhadap Hipotesis Kuznets yang menyatakan adanya hubungan berbentuk kurva U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masih jarang dilakukan secara menyeluruh di Indonesia, baik secara nasional maupun antarprovinsi, terutama dengan mempertimbangkan periode panjang pascareformasi.

Di sisi lain, belum banyak yang secara bersamaan menguji pengaruh variabel-variabel ekonomi makro seperti PDRB per kapita, tingkat pengangguran, investasi, pendidikan, dan infrastruktur teknologi sebagai faktor determinan ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menguji Hipotesis Kuznets menggunakan data panel periode 2004–2023 serta mengintegrasikan variabel kontrol yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat dan aktual dalam memahami pola serta faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hipotesis Kuznets terbukti dan berlaku di Indonesia pada tahun 2004-2023?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2004-2023?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2004-2023?
4. Bagaimana peran investasi dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2004-2023?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 2004-2023?
6. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 2004-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran dan keberlakuan hipotesis Kuznets di Indonesia pada periode 2004-2023.
2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2004-2023.
3. Mengidentifikasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2004-2023.
4. Menganalisis peran Investasi dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2004-2023.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2004-2023.
6. Mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2004-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada literatur ekonomi dengan menguji relevansi hipotesis Kuznets di Indonesia dan memperjelas pengaruh variabel ekonomi (PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pengurangan ketimpangan, khususnya dalam bidang pendidikan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada distribusi pendapatan.

3. Manfaat Akademis bagi Peneliti Lain

Menyediakan referensi bagi peneliti lain dalam kajian ketimpangan pendapatan serta menawarkan metode pengujian hipotesis Kuznets yang relevan bagi negara berkembang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah penurunan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menggambarkan situasi di mana pendapatan masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Menurut Todaro & Smith (2011), ketimpangan pendapatan merupakan distribusi pendapatan nasional yang tidak seimbang di antara berbagai rumah tangga dalam suatu negara. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata (Arafah & Khoirudin, 2022). Hal ini memperlebar jurang kesenjangan, di mana orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin miskin. Ketimpangan pendapatan yang semakin parah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti masalah ekonomi, kecemburuan sosial, dan bahkan peningkatan kriminalitas. Siswosoemarto (2012) menambahkan bahwa ketimpangan pendapatan yang menyebabkan kecemburuan sosial, ketegangan, serta meningkatnya kesenjangan dapat memicu tindakan kriminal atau kekerasan di masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan harus diatasi karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial (Ardana, 2018).

Tingginya ketimpangan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan dominasi investasi pada proyek-proyek padat modal, kebijakan industri substitusi impor, ketimpangan dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penurunan nilai tukar, peralihan

struktur produksi dari sektor pertanian ke sektor industri, urbanisasi, serta ketimpangan pendapatan tenaga kerja (Badriah, 2019).

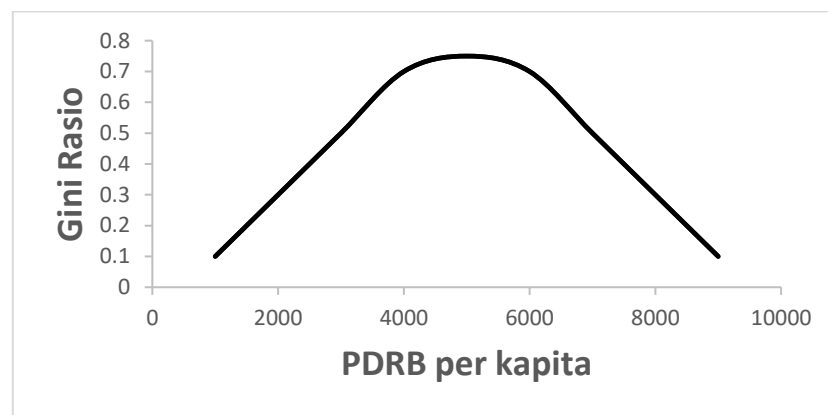
2.1.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sukirno (2006), distribusi pendapatan secara umum merujuk pada bagaimana pendapatan tersebar di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Dalam pengukuran distribusi ini, terdapat dua pendekatan utama, yaitu ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut mengukur kesenjangan pendapatan berdasarkan nilai-nilai mutlak tanpa memperhitungkan proporsi terhadap total pendapatan masyarakat. Sementara itu, ketimpangan relatif melihat seberapa besar pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan masyarakat (Sukirno, 2006).

Selanjutnya, Sukirno menjelaskan bahwa distribusi pendapatan juga merupakan aspek penting dalam permasalahan kemiskinan, karena berkaitan erat dengan ukuran kemiskinan relatif. Ia membedakan dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sedangkan kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah, yaitu ketika seseorang dianggap miskin karena pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata masyarakat (Sukirno, 2006).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Teori ini menyatakan bahwa kurva U terbalik menggambarkan kondisi di mana distribusi pendapatan cenderung tidak merata pada tahap awal pembangunan ekonomi, namun setelah pembangunan mencapai titik tertentu, distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata (Fauzia & Suseno, 2017). Kurva Kuznets, seperti yang terlihat pada Gambar

2.1, menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan (rasio gini) dan GDP per kapita. Ketika ekonomi mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Titik balik ini terjadi, misalnya, ketika sektor industri di perkotaan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja dari sektor pertanian atau ketika kontribusi sektor pertanian terhadap produksi dan pendapatan menjadi lebih kecil. Secara tidak langsung, Kuznets berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan pertumbuhan ekonomi, karena ketimpangan pendapatan pada akhirnya akan meningkat hingga titik tertentu, lalu menurun dengan sendirinya.



Sumber : Kuncoro, 2004

Gambar 2.1 Kurva Kuznet

Lebih lanjut kuznets berpendapat bahwa kelompok berpendapatan tinggi cenderung memberikan kontribusi besar terhadap modal dan tabungan, sementara kelompok lain memiliki modal yang jauh lebih kecil. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap sama, perbedaan dalam kemampuan menabung ini akan berdampak pada peningkatan proporsi pendapatan di kelompok berpenghasilan tinggi. Proses ini akan menciptakan efek akumulatif yang semakin memperkuat posisi kelompok tersebut dan memperlebar kesenjangan pendapatan di suatu negara.

Terdapat dua pendekatan utama dalam menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan, yakni teori Harrod-Domar dan teori Neoklasik. Kedua teori ini

sama-sama menekankan pentingnya peran modal, yang direpresentasikan melalui investasi yang masuk ke suatu wilayah. Investasi ini menjadi faktor krusial karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Namun, kemampuan daerah dalam menarik investasi tidaklah sama, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar wilayah. Secara umum, investor cenderung memilih daerah yang menjanjikan tingkat pengembalian (return) yang tinggi dalam waktu singkat. Akibatnya, daerah yang sudah relatif maju akan terus tumbuh lebih cepat karena lebih menarik bagi investor, sedangkan daerah yang tertinggal akan tumbuh lebih lambat karena kurang diminati. Pola ini menciptakan ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan perencanaan dan kebijakan strategis untuk mengarahkan investasi secara merata, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara lebih seimbang di seluruh wilayah (Sjafrizal, 2012).

Sementara itu, menurut Myrdal (1997), ketimpangan regional di negara-negara berkembang lebih banyak disebabkan oleh dominannya backwash effect dibandingkan dengan spread effect. Perpindahan modal dan sumber daya ke daerah yang lebih maju memperkuat pertumbuhan wilayah tersebut, namun sekaligus memperlemah potensi daerah tertinggal. Meningkatnya permintaan di wilayah maju mendorong arus investasi masuk yang pada akhirnya semakin memperbesar ketimpangan pendapatan antar wilayah.

2.1.1.2 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk, digunakan metode yang berdasarkan distribusi ukuran pendapatan. Namun, karena data pendapatan sulit diakses, pengukuran ketimpangan atau distribusi pendapatan umumnya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan. Dalam konteks ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pengganti pendapatan. Ada empat indikator yang mencerminkan ketimpangan

pendapatan, yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio), ukuran dari Bank Dunia, Indeks Theil, dan Indeks-L. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

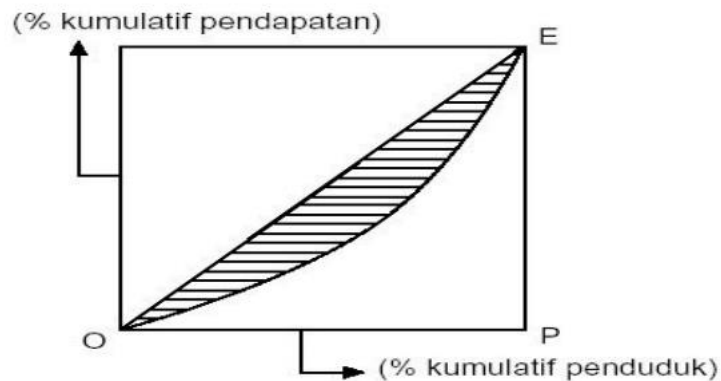
A. Menurut Bank Dunia

Berdasarkan Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan melihat persentase pendapatan yang diperoleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan total pendapatan populasi.

1. Ketimpangan dianggap tinggi jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya memperoleh kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional.
2. Ketimpangan dikategorikan sedang jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah memperoleh antara 12 hingga 17 persen dari pendapatan nasional.
3. Ketimpangan dianggap rendah apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah mendapatkan lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional.

B. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz digunakan untuk menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di antara populasi. Kurva ini digambarkan dalam sebuah bujur sangkar, di mana sumbu vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan nasional, dan sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk. Posisi kurva berada di dalam bujur sangkar dan mendekati diagonal. Semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal (semakin lurus), semakin merata distribusi pendapatan nasional. Sebaliknya, semakin jauh kurva Lorenz dari diagonal (semakin melengkung), semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional (Arsyad, 1997).



Sumber : Berkas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Pada gambar 2.2, sumbu horizontal menunjukkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh setiap persentase populasi. Garis diagonal di tengah disebut sebagai "garis kesetaraan sempurna," karena setiap titik di garis ini mewakili persentase penduduk yang memiliki persentase penerimaan pendapatan yang setara. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan pada Gambar 2.2 diwakili oleh area yang diarsir.

C. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dengan membandingkan pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu terhadap total pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna atau merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Semakin kecil nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di

suatu daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^N [fp_i(fc_i + fc_{i-1})]$$

Di mana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

F_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Ketimpangan pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan koefisien Gini (Susanti et al., 2007) sebagai berikut:

- a. Lebih kecil dari 0.4 : tingkat ketimpangan rendah.
- b. Antara 0.4 – 0.5 : tingkat ketimpangan moderat.
- c. Lebih tinggi dari 0.5 : tingkat ketimpangan tinggi.

Koefisien Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat prinsip utama (Todaro dan Smith, 2006), yaitu:

- 1) Prinsip anonimitas (*anonymity principle*): Ukuran ketimpangan tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Artinya, ukuran ini tidak didasarkan pada keyakinan bahwa satu individu lebih baik daripada yang lain, baik itu orang kaya maupun orang miskin.
- 2) Prinsip independensi skala (*scale independence principle*): Ketimpangan tidak seharusnya dipengaruhi oleh ukuran ekonomi atau negara, serta cara pengukuran pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tidak berubah apakah pendapatan diukur dalam mata uang

tertentu, seperti dolar atau rupiah, maupun apakah ekonomi itu kaya atau miskin secara rata-rata.

- 3) Prinsip independensi populasi (*population independence principle*): Pengukuran ketimpangan tidak bergantung pada jumlah penduduk penerima pendapatan. Misalnya, ketimpangan di Cina tidak bisa dibandingkan dengan Vietnam hanya karena perbedaan jumlah penduduknya.
- 4) Prinsip transfer (*transfer principle*): Dikenal juga sebagai prinsip Pigou-Dalton, prinsip ini menyatakan bahwa dengan asumsi semua faktor lainnya tetap, transfer pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (selama transfer tersebut tidak membuat orang miskin menjadi lebih kaya dari orang kaya) akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian dari waktu ke waktu, yang diukur melalui peningkatan output barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak output, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Maulidi & Sakti, 2024).

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap unit usaha di suatu daerah, atau jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di daerah tersebut. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita juga digunakan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu

daerah, karena dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk melalui nilai PDB atau PDRB. Kesejahteraan daerah tidak hanya dinilai dari besarnya nilai tambah, tetapi juga dari aliran dana keluar-masuk wilayah dan transfer pembayaran yang mempengaruhi pendapatan.

Dalam penghitungan PDRB, terdapat dua metode penyajian, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Berikut penjelasannya:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan: PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil per kapita di suatu daerah. BPS telah mengubah tahun dasar dari 2000 ke 2010 karena adanya perubahan struktur ekonomi dalam 10 tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi, serta berdasarkan rekomendasi Sistem Akun Nasional (SNA) 2008 yang memperbarui konsep, definisi, dan metodologi.
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku: PDRB ADHB menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dengan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB digunakan untuk menunjukkan nilai per kapita dan memantau perubahan struktur ekonomi suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini mengukur PDRB dengan menghitung nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu wilayah, dikurangi biaya antara dari setiap total produksi bruto per sub-sektor ekonomi dalam periode tertentu.

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini, PDRB dihitung berdasarkan total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi selama periode tertentu. Pendapatan nasional diperoleh dari penjumlahan pendapatan berbagai faktor produksi yang terlibat. Unsur-unsur pendapatan tersebut meliputi: Kompensasi tenaga kerja, yang mencakup gaji dan upah, serta elemen-elemen lain terkait penghasilan tenaga kerja. Keuntungan perusahaan, termasuk pembayaran pajak atas keuntungan, dividen untuk pemegang saham, dan laba yang disimpan oleh perusahaan. Pendapatan individu yang berasal dari usaha mandiri atau pekerja profesional.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menghitung PDRB dengan menjumlahkan nilai pasar dari semua permintaan akhir terhadap output yang dihasilkan suatu perekonomian, berdasarkan harga pasar yang berlaku. Komponen utama dari pendekatan ini meliputi:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit.
- Pengeluaran pemerintah.
- Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- Perubahan stok.
- Ekspor netto.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2004 hingga 2023. Namun, data yang tersedia menggunakan tahun dasar yang berbeda, khususnya tahun dasar 2000. Agar data tersebut dapat dibandingkan secara konsisten dalam satuan yang sama, maka perlu dilakukan penyamaan tahun dasar menjadi tahun 2010. Menurut Basuki (2015), proses penyamaan tahun dasar dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TD\ 2010 = \frac{PDRB\ per\ Kapita\ 2010\ TD\ 2010}{PDRB\ per\ Kapita\ 2010\ TD\ 2000} \times Tahun\ i$$

Keterangan:

TD 2010 = Tahun Dasar Harga Konstan 2010

TD 2000 = Tahun Dasar Harga Konstan 2000

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi menurut para ahli ekonomi antara lain adalah sebagai berikut (Sukirno, 2011: 335):

A. Teori Solow-Swan

Ekonom yang mempelopori pengembangan teori Neo-Klasik adalah Robert Solow dan Trevor Swan, yang mulai berkembang pada tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan faktor-faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Dalam pandangan teori ini, sejauh mana perekonomian dapat berkembang sangat bergantung pada laju pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan inovasi teknologi.

B. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara stabil (*steady growth*). Beberapa asumsi dalam teori Harrod-Domar adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian beroperasi pada tingkat penuh (*full employment*), dan barang-barang modal yang ada digunakan secara maksimal.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor utama, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Jumlah tabungan masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional, yang berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.

- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) bersifat tetap, begitu juga dengan rasio antara modal-output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Menurut teori Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatan nasionalnya hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak (seperti gedung, peralatan, dan material). Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi baru yang akan menambah stok modal.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan yang merata. Menurut Schultz dalam Jhingan (2012:414), terdapat lima pendekatan untuk mengembangkan SDM, yaitu:

1. Penyediaan layanan kesehatan
2. Pelatihan keterampilan
3. Pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
4. Program belajar bagi orang dewasa seperti program ekstensi pertanian
5. Serta mobilitas penduduk (migrasi) dalam menyesuaikan diri terhadap peluang kerja yang dinamis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 melalui laporan tahunan Human Development Report (HDR). Menurut BPS (2015), IPM menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. UNDP mengembangkan IPM untuk menekankan bahwa pembangunan seharusnya berfokus pada manusia dan peningkatan kapasitasnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.

IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Dimensi pendidikan dievaluasi melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan lama pendidikan yang diharapkan akan ditempuh anak-anak usia 7 tahun ke atas. Sementara itu, dimensi standar hidup dinilai dari pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP).

Meski IPM memberikan gambaran umum mengenai capaian pembangunan manusia, UNDP (2018) menyatakan bahwa IPM belum sepenuhnya mencerminkan aspek-aspek penting lainnya seperti ketimpangan, kemiskinan, keamanan, maupun pemberdayaan, sehingga diperlukan indeks-indeks komposit tambahan untuk analisis yang lebih menyeluruh. Adapun manfaat IPM antara lain sebagai indikator kualitas SDM suatu wilayah, alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, dasar penentuan peringkat pembangunan antarwilayah, serta acuan strategis dalam evaluasi kinerja pemerintah dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). BPS (2015) membagi IPM dalam empat kategori: IPM rendah (nilai < 60), IPM sedang (60–69,9), IPM tinggi (70–79,9), dan IPM sangat tinggi (≥ 80).

2.1.3.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Teori Human Capital, yang dikemukakan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz, menekankan bahwa investasi dalam manusia, terutama melalui pendidikan dan kesehatan, mampu meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan produktivitas individu, yang pada akhirnya berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan konsep ini secara komprehensif, karena IPM mengukur kualitas sumber daya manusia melalui tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, IPM menjadi indikator penting untuk melihat seberapa besar modal manusia yang dimiliki suatu daerah.

Menurut teori ini, wilayah dengan nilai IPM yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, serta daya beli yang lebih kuat, yang kesemuanya berperan dalam mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Individu yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar tenaga kerja. Lebih lanjut, investasi pada peningkatan IPM dianggap sebagai langkah strategis dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, karena manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, IPM tidak hanya menjadi ukuran kesejahteraan saat ini, tetapi juga mencerminkan kapasitas pembangunan masa depan yang ditopang oleh kualitas sumber daya manusia suatu wilayah.

2.1.4 Investasi

Investasi atau penanaman modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aset modal dan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tetapi jika distribusinya tidak merata, hal ini dapat memicu ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketika investor, baik dari dalam maupun luar negeri, lebih memilih wilayah-wilayah dengan potensi keuntungan yang lebih besar, daerah-daerah yang kurang berkembang akan semakin tertinggal. Hal ini berkaitan dengan keputusan investasi yang

cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, yang dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Menurut Mankiw (2006), investasi adalah salah satu komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu:

- (a) Investasi tetap bisnis yang mencakup peralatan dan infrastruktur yang dibeli oleh perusahaan untuk mendukung proses produksi,
- (b) Investasi residensial yang meliputi rumah baru yang dibeli baik untuk tempat tinggal maupun untuk disewakan, dan
- (c) Investasi persediaan, yang mencakup barang-barang yang disimpan di gudang perusahaan, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.

Sultan dan Jamzani (2010) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, pembangunan yang tidak merata antar daerah menjadi salah satu permasalahan utama. Di Indonesia, misalnya, kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau mengakibatkan kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan. Beberapa faktor penyebab ketimpangan ekonomi di berbagai daerah antara lain:

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar dan pusat ekonomi.
- b. Distribusi investasi yang tidak merata, di mana wilayah-wilayah terpencil seringkali tidak mendapatkan aliran investasi yang memadai.
- c. Rendahnya mobilitas faktor produksi antar wilayah, sehingga tenaga kerja dan modal cenderung terkonsentrasi di daerah tertentu.
- d. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) di setiap daerah, di mana beberapa daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara yang lain tidak.
- e. Variasi kondisi geografis antar wilayah, yang membatasi aksesibilitas dan potensi pengembangan ekonomi di beberapa wilayah.

- f. Tidak lancarnya perdagangan antar provinsi, yang menghambat distribusi barang dan jasa secara merata.

2.1.4.1 Teori Investasi

A. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar menyoroti pentingnya investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini berkembang dari pemikiran Keynes yang fokus pada jangka pendek, di mana investasi memengaruhi permintaan agregat melalui mekanisme multiplier. Harrod-Domar memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi melalui pembentukan modal. Dengan demikian, investasi berperan dalam menambah stok modal seperti pabrik, peralatan, dan infrastruktur, yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985).

Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Modal yang dihasilkan dari akumulasi tabungan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kapasitas produksi barang serta jasa. Hubungan positif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa rendahnya investasi akan menghambat kapasitas produksi dan menurunkan pendapatan per kapita. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah karena perbedaan distribusi investasi, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah (Arsyad, 1997).

B. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988. Teori ini memberikan perspektif penting dalam memahami peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama dalam teori ini adalah bahwa perkembangan teknologi

menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi laju investasi. Menurut Todaro (1994), model pertumbuhan endogen dapat menjelaskan potensi keuntungan investasi yang lebih tinggi di negara-negara berkembang, terutama dengan rasio modal terhadap tenaga kerja yang rendah.

Teori ini menganggap bahwa kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, melainkan hasil dari investasi dalam sumber daya manusia dan pengembangan industri berbasis teknologi, baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Inovasi dan kemajuan teknologi yang terjadi melalui investasi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta menciptakan eksternalitas ekonomi positif. Teknologi yang dihasilkan dari investasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, ketimpangan distribusi investasi antara wilayah dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, terutama di wilayah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi. Pengembangan wilayah yang tertinggal melalui investasi yang terarah, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak aktif mencari pekerjaan tidak dikategorikan sebagai penganggur. Sementara itu, tingkat pengangguran adalah rasio antara jumlah penganggur atau pencari kerja dengan

total angkatan kerja dalam periode tertentu, yang disajikan dalam bentuk persentase. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat dan merupakan tantangan besar yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja (Sukirno, 2019).

Sukirno (2019) mengidentifikasi empat penyebab utama pengangguran, yaitu:

- 1) Pengangguran Friksional, yang terjadi ketika perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.
- 2) Pengangguran Siklikal, yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan aktivitas ekonomi secara umum.
- 3) Pengangguran Struktural, yang muncul akibat perubahan dalam struktur atau komposisi ekonomi.
- 4) Pengangguran Teknologi, yang terjadi karena penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin atau teknologi canggih lainnya, yang dipicu oleh kemajuan teknologi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran merujuk pada individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini terjadi karena pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Akibatnya, semakin banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan di dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, mereka tidak terlibat dalam aktivitas pekerjaan, sehingga mengalami pengangguran nyata atau

setengah waktu. Oleh sebab itu, keadaan ini disebut sebagai pengangguran terbuka.

2.1.5.1 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

A. Teori Klasik

Menurut Teori Klasik, pengangguran dapat diatasi melalui mekanisme pasar bebas di mana sisi penawaran dan harga akan menyesuaikan sehingga permintaan mampu menyerap seluruh penawaran (*supply*). Pandangan ini juga menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena adanya salah alokasi sumber daya yang sifatnya sementara dan dapat diatasi melalui mekanisme pasar (Gilarso, 2004: 143).

B. Teori Keynes

Teori Keynes memiliki pandangan yang berbeda dengan Teori Klasik. Menurut Keynes, pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat, yang menghambat pertumbuhan ekonomi bukan karena rendahnya produksi, melainkan kurangnya konsumsi. Keynes menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar bebas. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, upah cenderung menurun, dan penurunan ini berdampak merugikan karena menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Selain itu, dalam kenyataannya, upah cenderung sulit untuk turun. Oleh karena itu, Teori Keynes dianggap tidak sepenuhnya tepat dalam menjelaskan situasi ini.

C. Teori Pengangguran (Klasik)

Menurut teori pengangguran klasik, seperti yang dijelaskan dalam buku Ekonomi Tenaga Kerja (Sukirno, 2016: 45), pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan

tenaga kerja. Pengangguran ini disebabkan oleh upah yang tinggi di pasar tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja lebih besar daripada jumlah yang dipekerjakan oleh perusahaan. Ketidakseimbangan ini terjadi karena pasar tenaga kerja tidak fleksibel, yang berarti upah tidak dapat turun ke tingkat yang lebih rendah untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan ditandai dengan keterbatasan atau ketiadaan aset materiil yang dimiliki individu. Sedangkan secara kualitatif, kemiskinan menggambarkan kondisi hidup yang tidak manusiawi atau tidak layak (Milensen, 2003:194). Suparlan (2004:315) menyatakan bahwa kemiskinan mencerminkan standar hidup yang rendah yang ditandai dengan kekurangan pada kelompok tertentu, yang berdampak langsung terhadap kesehatan, moralitas, serta harga diri individu yang tergolong miskin.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam enam jenis:

1. Kemiskinan Subjektif

yakni kemiskinan yang dirasakan berdasarkan persepsi pribadi seseorang yang merasa kebutuhannya belum terpenuhi meski secara objektif belum termasuk miskin.

2. Kemiskinan Absolut

yakni kondisi ketika pendapatan seseorang atau rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

3. Kemiskinan Relatif

yaitu kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan distribusi hasil pembangunan sehingga sebagian masyarakat tertinggal.

4. Kemiskinan Alamiah

terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam di wilayah tertentu sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah.

5. Kemiskinan Kultural

disebabkan oleh pola pikir atau kebiasaan masyarakat yang enggan berubah dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidup

6. Kemiskinan Struktural

yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak mampu menghubungkan masyarakat miskin dengan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana garis kemiskinan menjadi ukuran minimal dalam standar hidup suatu negara. Meskipun kemajuan global terus berkembang, hal tersebut tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bahkan, perkembangan di berbagai sektor justru berpotensi melahirkan bentuk-bentuk kemiskinan baru, terutama akibat sistem ekonomi kapitalis global yang menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan PDRB per kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi yang berpotensi memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Berdasarkan Hipotesis Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita cenderung meningkatkan ketimpangan karena manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi atau sektor modern. Namun, seiring waktu, setelah mencapai titik tertentu (*turning point*), peningkatan PDRB per kapita dapat menurunkan ketimpangan akibat redistribusi pendapatan yang

lebih merata dan peningkatan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi. Studi empiris oleh Yudhoyono (2018) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan di provinsi dengan industrialisasi tinggi, sementara Kurniawati (2020) menemukan pola hubungan U terbalik di beberapa wilayah Indonesia yang mendukung Hipotesis Kuznets. Hal ini menunjukkan bahwa variasi hubungan antara PDRB per kapita dan ketimpangan distribusi pendapatan bergantung pada struktur ekonomi dan kebijakan yang diterapkan di setiap provinsi.

2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah dari segi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Wilayah dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan serta peluang ekonomi yang lebih merata, sehingga mampu menekan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, rendahnya IPM menandakan keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar yang esensial, yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu tertinggal secara ekonomi dan sosial. Ketimpangan dalam pembangunan manusia inilah yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan antarkelompok. Dalam kerangka teori modal manusia, peningkatan IPM berperan sebagai instrumen untuk mendorong mobilitas sosial dan memperluas kesempatan kerja yang produktif, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih inklusif. Oleh karena itu, peningkatan IPM secara merata di seluruh wilayah menjadi strategi penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, karena ia meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

2.2.3 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Secara teori, peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memberikan kesempatan ekonomi bagi lebih banyak individu. Namun, jika investasi terkonsentrasi hanya pada sektor tertentu atau dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi, maka ketimpangan dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia, peningkatan investasi berpengaruh positif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, terutama ketika investasi diarahkan ke sektor yang padat karya. Di sisi lain, penelitian oleh Wibowo (2018) menemukan bahwa di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, investasi lebih banyak menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga meningkatkan ketimpangan. Dengan demikian, pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan bergantung pada distribusi sektor investasi dan kondisi sosial-ekonomi daerah tersebut.

2.2.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak individu kehilangan sumber pendapatan, yang memperlebar kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki pekerjaan stabil dan kelompok berpenghasilan rendah yang terdampak. Hal ini cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena pendapatan terkonsentrasi pada kelompok yang lebih kecil. Studi oleh Prasetyo dan Wicaksono (2019) menunjukkan bahwa peningkatan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di

Indonesia, terutama di daerah perkotaan dengan populasi pekerja informal yang besar. Namun, kebijakan yang efektif dalam mengurangi pengangguran, seperti program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya, dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

2.2.5 Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan distribusi pendapatan, karena keduanya saling memengaruhi dan mencerminkan ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Ketika sebagian besar penduduk berada di bawah garis kemiskinan, distribusi pendapatan menjadi semakin timpang karena hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang menguasai sebagian besar kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum yang layak. Kemiskinan yang bersifat struktural dan kultural juga dapat memperkuat ketimpangan, karena kelompok miskin cenderung sulit keluar dari lingkaran kemiskinan akibat keterbatasan modal, keterampilan, dan jaringan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu wilayah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang relevan bermanfaat untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap studi-studi terdahulu yang dianggap relevan, seperti yang diuraikan berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sebastien Breau & Annie Lee	The evolution of the Kuznets curve in Canada	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan. Variabel Independen: PDB per kapita, PDB per kapita kuadrat, Populasi, tingkat pengangguran, Pendidikan, Partisipasi Pekerja Perempuan, dan Imigrasi	Menggunakan Data Panel dengan Ordinary Least Square	Hipotesis Kuznets terbukti relevan dalam penelitian ini, dengan temuan tambahan berupa pola kurva berbentuk S (Kuznets wave). Ketimpangan pendapatan cenderung menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik tertentu, kemudian meningkat kembali. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ukuran

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					populasi dan perubahan struktur industri merupakan faktor utama yang mendorong dinamika gelombang tersebut.
2.	Oksana Melikhov a & Jakub Cizek (2014)	Kuznets Inverted U-Curve Hypothesis Examined On Up-To Date Observations For 145 Countries	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan. Variabel Independen: PDB per kapita, PDB per kapita kuadrat, Kontribusi Sosial, subsidi dan transfer	Menggunakan Data Panel	Hipotesis Kuznet terbukti berlaku di negara dengan kontribusi sosial yang rendah. Variabel Kontribusi Sosial dan subsidi dan transfer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3.	Nukhet Dogan & Reyhan Cafri (2016)	Which Hypothesis Is Valid In Oecd Countries,	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan.	Menggunakan Metode Data Panel Dinamis dan Generalised	Hipotesis Kuznet tidak terbukti berlaku di

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Kuznets U Curve Or Great U-Turn? System Gmm Estimation For Dynamic Panel Data	Variabel Independen: PDB per kapita, PDB per kapita kuadrat, Teknologi, tenaga kerja di sektor pertanian, suku bunga dan Investasi Asing Langsung (FDI)	Method of Moments (GMM)	negara-negara OECD. Teknologi dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. suku bunga dan investasi asing langsung berpengaruh negatif dan signifikan.
4.	Jarosław Oczki, Joanna Muszynska, & Ewa Wedrowska (2017)	Kuznets Hypothesis Of Income Inequality: Empirical Evidence From Eu	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan. Variabel Independen: PDB per kapita, Rasio Ketergantungan Usia Tua, Tenaga Kerja Wiraswasta, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan	Menggunakan model regresi data panel. Uji statistik seperti uji Wald, Breusch-Pagan, dan Hausman	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan berbentuk U, bukan U terbalik. Tingkat pengangguran dan pencapaian pendidikan tinggi berhubungan positif dan signifikan dengan

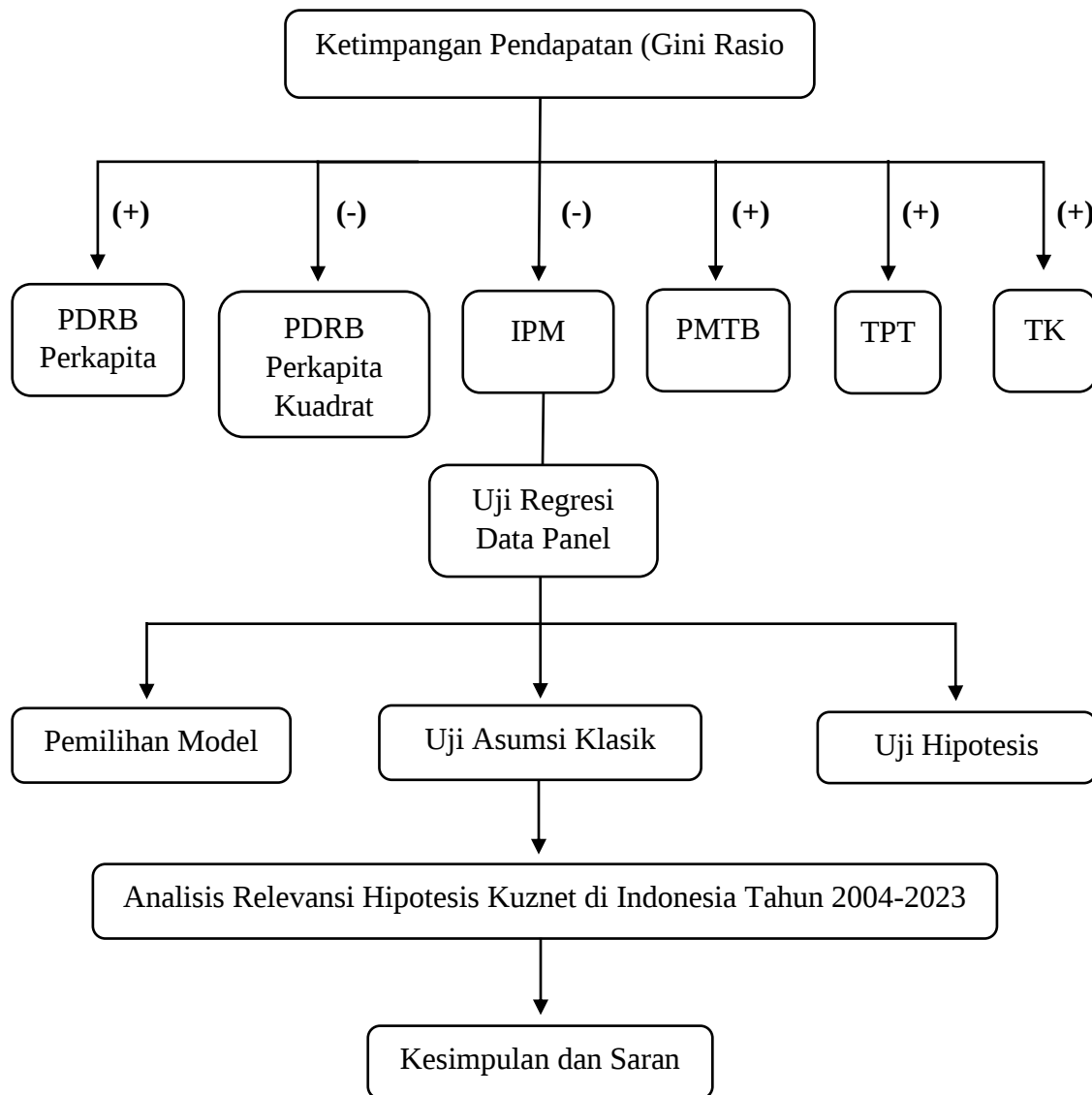
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Tinggi Usia 15 Tahun Keatas.		ketimpangan pendapatan. Rasio ketergantungan usia lanjut juga signifikan di negara EU15, sedangkan proporsi pekerja mandiri signifikan di negara anggota baru.
5.	Diego Martinez Navvaro, Ignacio Amate Fortes & Almudena Guarnido (2020)	Inequality And Development: Is The Kuznets Curve In Effect Today?	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen: Pendidikan, Demokrasi, Ipm, dan Kontribusi Pendapatan Sektor Pertanian	Menggunakan teknik Cochrane-Orcutt untuk mengatasi autokorelasi pada data panel, serta model Generalised Method of Moments (GMM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets terbukti secara keseluruhan, di mana terdapat hubungan berbentuk kurva U terbalik antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Demokrasi berpengaruh positif namun tidak signifikan.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Pendidikan, IPM dan kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
6.	Taresh A, A., Sari, D. W., & Purwono, R. (2021)	Analysis Of The Relationship Between Income Inequality And Social Variables: Evidence From Indonesia	Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. Variabel Inependen: Pertumbuhan penduduk, Pengangguran, kesehatan, pendidikan, Indeks pembangunan manusia, Pertumbuhan urbanisasi.	Menggunakan kointegrasi dan regresi otomatis vektor struktural jangka panjang (SVAR). Data panel	Pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan kesehatan yang buruk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. pendidikan dan pembangunan manusia dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7.	Martin Ravallion Shaohua Chen (2021)	Is That Really A Kuznets Curve? Turning Points For Income Inequality In China	Variabel Dependen : Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen: PDRB per kapita dan PDRB kuadrat per kapita	Analisis Regresi Data Panel dan Log Deviation (MLD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di China mengikuti kurva U terbalik seperti yang dihipotesiskan oleh Kuznets, dengan peningkatan ketimpangan hingga titik balik pada tahun 2010, kemudian mulai menurun. Namun, penurunan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prediksi model Kuznets, melainkan lebih mencerminkan model Lewis yang menekankan transformasi struktural.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Terdapat hubungan yang berbentuk U terbalik antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan, yang mendukung hipotesis Kuznets bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat, namun seiring dengan pertumbuhan lebih lanjut, ketimpangan tersebut akan menurun.
2. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Diduga PDRB per kapita kuadrat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
5. Diduga Pembentukan Modal Tetap Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
6. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
7. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme, diterapkan pada populasi dan sampel tertentu, serta menggunakan data berupa angka yang dianalisis secara statistik guna menghasilkan kesimpulan yang objektif. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Narbuko dan Achmadi (2015), penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah melalui penyajian, analisis, dan interpretasi data secara sistematis.

Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia dengan periode analisis dari tahun 2004 hingga 2023. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten selama dua dekade terakhir, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang yang lebih komprehensif. Selain itu, kurun waktu tersebut mencakup berbagai peristiwa penting yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional, seperti krisis keuangan global 2008, reformasi kebijakan fiskal, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan.

Adapun jumlah provinsi yang dianalisis sebanyak 33 provinsi, dengan pengecualian Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data yang memadai sejak awal periode penelitian, mengingat Kalimantan Utara baru dimekarkan pada tahun 2012. Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan data deret waktu (time series) yang digunakan, provinsi tersebut tidak disertakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini melibatkan tujuh variabel, terdiri atas satu variabel dependen, yaitu Ketimpangan Distribusi Pendapatan (diukur dengan Rasio Gini), serta enam variabel independen, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kuadrat, Indeks Pembangunan Manusia, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018), data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, melainkan diperoleh dari pihak lain atau dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (Gujarati & Porter, 2015). Dalam penelitian ini, data time series yang digunakan mencakup 20 tahun, yaitu dari 2004 hingga 2023, sementara data cross section terdiri dari 33 provinsi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan Eviews 12.

Tabel 3.1 Variabel, Satuan, dan Sumber Data

Variabel	Satuan	Sumber Data
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0-1	Badan Pusat Statistik
PDRB Per kapita	Ribu Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik
Indeks Pembangunan Manusia	0-100	Badan Pusat Statistik
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta Rupiah (Rp)	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	Badan Pusat Statistik
Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	Badan Pusat Statistik

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Gini Rasio, yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu wilayah menyimpang dari pemerataan sempurna. Nilai Gini Rasio berkisar dari 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Dalam penelitian ini, data Gini Rasio diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), diukur per provinsi setiap tahun untuk periode 2004-2023.

2. PDRB Per Kapita atas Harga Konstan

PDRB per kapita mengukur rata-rata output ekonomi per individu di suatu provinsi, di mana PDRB per kapita dihitung atas dasar harga konstan dalam ribuan rupiah. Ini mencerminkan daya beli yang disesuaikan dengan inflasi sehingga lebih akurat dalam menggambarkan perubahan ekonomi. Data PDRB per kapita atas harga konstan diperoleh dari BPS dan dianalisis untuk seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2004-2023.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga indikator utama: angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai IPM dinyatakan dalam indeks dengan skala 0–100, di mana semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin tinggi kualitas pembangunan manusia. Data IPM diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan dalam penelitian ini untuk periode 2004–2023.

4. Investasi (Pembentukan Modal Dalam Tetap Bruto)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya investasi dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk proses produksi, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan infrastruktur. Variabel ini mencerminkan tingkat akumulasi modal fisik yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Data PMTB diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan juta rupiah menurut harga konstan 2010 untuk periode 2004–2023.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Variabel ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Data TPT diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan persen per provinsi setiap tahun untuk periode 2004–2023.

6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Variabel ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Data tingkat kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan persen (%) untuk periode 2004–2023.

3.4 Spesifikasi Model

1. Model penelitian untuk menguji hipotesis kuznets

Model dalam penelitian ini menggunakan model Regresi kuadratik untuk menguji hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan non-linear berbentuk U terbalik antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan. Hipotesis ini menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, namun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, ketimpangan mulai menurun. Untuk menangkap hubungan non-linear ini, model regresi yang digunakan berbentuk kuadratik, di mana PDRB per kapita dan kuadratnya dimasukkan sebagai variabel independen, dengan ketimpangan pendapatan (diukur menggunakan rasio Gini) sebagai variabel dependen.

Model hipotesis Kuznets yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada spesifikasi kuadratik yang telah banyak digunakan dalam literatur sebelumnya, khususnya sejak penelitian Ahluwalia (1976) pada tingkat lintas negara. Sejak saat itu, bentuk fungsi kuadratik dengan memasukkan pendapatan per kapita dalam bentuk linear dan kuadrat menjadi spesifikasi umum dalam studi pengujian hipotesis kuznets (Fields, 2001). Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh Breau & Lee (2023) dan Melikhova & Cizek (2014), yaitu mengestimasi model kuadratik untuk menguji hubungan non-linear antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan serta menambahkan variabel kontrol sesuai dengan Hipotesis Kuznets, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log GDP_{it} + \beta_2 (\log GDP_{it})^2 + Z + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$GINI_{it}$ = Ketimpangan Pendapatan
 GDP_{it} = GDP per kapita
 β_0 = intersep

β_1 dan β_2	= koefisien
Log	= Logaritma
Z	= Variabel kontrol
ε	= Residual (<i>error term</i>)
i	= Wilayah
t	= Waktu

Model Hipotesis Kuznets yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rujukan-rujukan empiris tersebut, yaitu sebagai berikut:

$$\text{GINI}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log \text{PDRB per Kapita}_{it} + \beta_2 (\log \text{PDRB per Kapita}_{it})^2 + \beta_3 \text{IPM}_{it} + \beta_4 \text{PMTB}_{it} + \beta_5 \text{TPT}_{it} + \beta_6 \text{TK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

GINI_{it}	= Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)
PDRB_{it}	= Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
IPM_{it}	= Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PMTB_{it}	= Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
TPT_{it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TK_{it}	= Tingkat Kemiskinan
β_0	= Kostanta
$\beta_1, 2, 3, 4, 5$	= Koefisien
Log	= Logaritma
ε	= Residual (<i>error term</i>)
i	= Provinsi
t	= Waktu

Asumsi dan Interpretasi:

- Jika $\beta_1 > 0$ dan $\beta_2 < 0$, maka terdapat hubungan U terbalik antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan, yang sesuai dengan Hipotesis Kuznets (Melikhova & Cizek, 2014).

- Turning Point: $\frac{-\beta_1}{2\beta_2}$

Dalam menguji Hipotesis Kuznets pada penelitian ini, digunakan transformasi logaritma terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita). Transformasi ini bertujuan untuk mengurangi skala variabel yang sangat besar dan tersebar luas, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi lebih proporsional, linear, dan mudah diinterpretasikan (Barro, 2000). Selain itu, transformasi ini memungkinkan koefisien regresi diartikan sebagai elastisitas, yakni perubahan persentase ketimpangan pendapatan akibat perubahan persentase PDRB per kapita, yang memberikan makna ekonomis lebih relevan dibandingkan perubahan absolut. Penggunaan logaritma juga membantu memenuhi asumsi klasik regresi seperti normalitas residual dan homoskedastisitas, sehingga menghasilkan estimasi yang valid dan efisien. Dengan demikian, penerapan transformasi logaritma dalam model kuadratik ini mempermudah pengujian pola hubungan non-linear berbentuk U terbalik yang menjadi inti dari Hipotesis Kuznets, sekaligus memberikan interpretasi hasil yang lebih jelas dan ekonomis.

Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Squares (OLS). Pemilihan OLS dilatarbelakangi oleh kemampuannya dalam menghasilkan estimasi parameter yang efisien, tidak bias, dan konsisten selama asumsi-asumsi klasik terpenuhi (BLUE - Best Linear Unbiased Estimator). Selain itu, OLS merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pengujian Hipotesis Kuznets di berbagai studi empiris, seperti penelitian oleh Amos (1988), Ram's (1991) dan Breau & Lee (2023), karena mampu menangkap bentuk hubungan non-linear seperti kurva U terbalik secara sederhana namun efektif. Penggunaan OLS juga memungkinkan interpretasi koefisien yang lebih langsung dan mudah dipahami, sehingga sangat sesuai untuk analisis kuantitatif terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, sebagaimana yang diharapkan dalam pengujian Hipotesis Kuznets ini.

2. Justifikasi Pemilihan Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini, pembuktian Hipotesis Kuznets dilakukan untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan non-linear terhadap ketimpangan pendapatan, dengan membentuk kurva U terbalik. Namun, dalam hubungan tersebut terdapat variabel-variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, digunakan variabel kontrol yang bertujuan untuk menjaga validitas hasil estimasi, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak bias akibat pengaruh variabel lain. Adapun variabel kontrol yang digunakan adalah: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan. Berikut penjelasan rinci mengenai masing-masing variabel:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai variabel kontrol karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata, karena akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan lebih baik dan tersebar. Secara teoritis, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok miskin, sehingga berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan. Model pertumbuhan Solow menekankan bahwa modal manusia merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Navarro et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan IPM berdampak negatif terhadap Gini Ratio, yang berarti semakin tinggi IPM, maka ketimpangan cenderung menurun.

2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi. Namun, distribusi investasi yang tidak merata dapat menciptakan ketimpangan wilayah dan sosial, karena hanya daerah atau kelompok tertentu yang menikmati manfaat dari investasi tersebut. Maka dari itu, PMTB dikontrol dalam model agar tidak mengaburkan hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan. Secara teoritis, pendekatan struktural menyebutkan bahwa distribusi modal sangat memengaruhi struktur ketimpangan. Penelitian Dogan & Cafri (2016) mengungkapkan bahwa investasi yang menyebar secara merata dapat memperkecil ketimpangan, sementara Suryahadi et al. (2009) menemukan bahwa konsentrasi PMTB di wilayah maju di Indonesia memperlebar kesenjangan antarprovinsi.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dipilih sebagai variabel kontrol karena pengangguran mengindikasikan rendahnya akses terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan. Ketimpangan dapat meningkat jika sebagian besar penduduk tidak memperoleh pendapatan tetap, sedangkan kelompok lainnya memperoleh penghasilan yang terus meningkat. Dalam teori dualisme pasar tenaga kerja, pengangguran menciptakan ketimpangan karena hanya sebagian populasi yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pengangguran jangka panjang menjadi hambatan bagi distribusi pendapatan yang merata di negara berkembang. Hutagalung et al. (2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif terhadap ketimpangan di negara berkembang, di mana daerah dengan pengangguran tinggi cenderung memiliki Gini Ratio yang lebih besar.

4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan berperan sebagai variabel kontrol karena kemiskinan yang tinggi merupakan indikator awal dari distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, porsi penduduk berpendapatan rendah lebih besar, yang secara statistik meningkatkan angka ketimpangan. Secara teoritis, pendekatan pembangunan inklusif menekankan pentingnya pengurangan kemiskinan sebagai bagian dari strategi penurunan ketimpangan. Aini (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan jika ketimpangan awal sudah tinggi, karena manfaat pertumbuhan hanya dirasakan oleh kelompok atas. Badriah (2019) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan positif dengan ketimpangan, dan distribusi pendapatan yang timpang banyak terjadi di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data merupakan proses penyederhanaan yang bertujuan agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Pemilihan metode dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik variabel yang diteliti, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara akurat. Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan data panel (*pooled data*), yaitu kombinasi dari data lintas sektor (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*). Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi data panel dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018:363), regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data deret waktu (*time series*), yang dalam penelitian ini mencakup periode 2004-2023, dengan data lintas sektoral (*cross section*), di mana unit yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Regresi ini menghasilkan model untuk melihat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam objek penelitian. Jika tersedia T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah

wilayah ($i = 1, 2, \dots, N$), maka data panel akan menghasilkan total NT unit observasi. Jika periode waktunya sama, ini disebut *balanced panel*, sedangkan jika berbeda disebut *unbalanced panel*. Dalam penelitian ini, karena periode waktunya sama untuk setiap variabel, digunakan *balanced panel*.

Ada beberapa keunggulan dalam menggunakan data panel. Pertama, penggabungan data *cross section* dan *time series* menghasilkan lebih banyak data, yang meningkatkan *degree of freedom*. Keunggulan lain adalah dengan menggabungkan informasi dari kedua jenis data tersebut, masalah yang timbul akibat penghilangan variabel (*committed variable*) dapat diatasi (Widarjono, 2018:363).

2. Estimasi Model Data Panel

Menurut Gujarati dan Porter (2009), analisis data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang terdiri dari: *Common Effect* (Efek Umum), *Fixed Effect* (Efek Tetap), dan *Random Effect* (Efek Acak).

a. Pendekatan *Common Effect Model*

Menurut Widarjono (2018), metode paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Tanpa mempertimbangkan perbedaan antar waktu dan antar wilayah, model ini dapat diestimasi menggunakan metode OLS. Teknik ini dikenal sebagai estimasi *Common Effect*, di mana tidak ada perhatian khusus terhadap dimensi wilayah atau waktu. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perilaku data antar wilayah dianggap sama sepanjang waktu. Spesifikasi model dari pendekatan *common effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \dots + \beta_n x_{nit} + E_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = variabel dependen untuk unit ke- i pada waktu ke- t

x_{nit} = variabel independen ke- n untuk unit ke- i pada waktu ke- t

β_0 = intersep (konstan) yang sama untuk seluruh unit dan waktu

β_n = koefisien regresi variabel independen

E_{it} = komponen error yang bersifat idiosinkratik (white noise)

b. Pendekatan *Fixed Effect Model*

Menurut Widarjono (2018), model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep dalam persamaan dikenal sebagai model regresi *fixed effect*. Teknik ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep. Konsep *fixed effect* didasarkan pada perbedaan intersep antar wilayah, namun intersep tersebut tetap sama sepanjang waktu (*time invariant*). Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Spesifikasi matematis dari pendekatan Fixed Effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_n D_{nit} + E_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = variabel dependen untuk unit ke-i pada waktu ke-t

x_{1it} dan x_{nit} = variabel independen ke-n untuk unit ke-i pada waktu ke-t

D_1, D_2, D_3, D_n = variabel dummy

β_0 = intercept khusus untuk masing-masing unit (provinsi)

β_n = koefisien regresi variabel independen

E_{it} = komponen error yang bersifat idiosinkratik (white noise)

c. Pendekatan *Random Effect Model*

Menurut Widarjono (2018), dalam *fixed effect model (FEM)*, variabel dummy digunakan untuk merepresentasikan ketidakpastian kita terhadap model yang

sebenarnya. Namun, penggunaan variabel ini mengurangi derajat kebebasan, yang pada gilirannya menurunkan efisiensi estimasi parameter. Untuk mengatasi hal tersebut, *Random Effect Model (REM)* dapat diterapkan, yang melibatkan penggunaan variabel gangguan (error terms). *Random Effect Model (REM)* mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa variabel gangguan mungkin memiliki keterkaitan antara waktu dan wilayah. Spesifikasi matematis dari pendekatan Random Effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_i + E_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = variabel dependen untuk unit ke-i pada waktu ke-t

X_{nit} = variabel independen ke-n untuk unit ke-i pada waktu ke-t

β_0 = intercept umum

β_n = koefisien regresi variabel independen

u_i = efek acak individual (random effect) yang menangkap heterogenitas antar unit

E_{it} = komponen error yang bersifat idiosinkratik (white noise)

3. Pemilihan Model

Beberapa tahapan pengujian perlu dilakukan untuk menentukan model terbaik dalam regresi data panel, yaitu:

a. Uji Chow

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dalam estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Model *Common Effect* dipilih
- H_a : Model *Fixed Effect* dipilih

Keputusan untuk memilih model didasarkan pada nilai probabilitas dari cross-section F. Jika probabilitas cross-section $F < (\alpha = 0.05)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti model *Fixed Effect* yang terpilih. Sebaliknya, jika probabilitas cross-section $F > (\alpha = 0.05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Common Effect Model (CEM)*. Jika model *Fixed Effect* yang terpilih, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan.

b. Uji Hausman

Pengujian ini merupakan langkah lanjutan untuk menentukan apakah model *Random Effect* atau *Fixed Effect* yang paling sesuai, dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Model *Random Effect* dipilih (REM)
- H_a : Model *Fixed Effect* dipilih (FEM)

Keputusan ditentukan berdasarkan nilai probabilitas cross-section F. Jika probabilitas cross-section $F < (\alpha = 0.05)$, maka H_0 ditolak, dan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section $F > (\alpha = 0.05)$, maka H_0 diterima, dan model yang dipilih adalah *Random Effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih baik dibandingkan model *common effect*, dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Model *Common Effect* (CEM) dipilih
- H_a : Model *Random Effect* (REM) dipilih

Jika nilai LM hitung lebih besar daripada nilai kritis Chi-Square, maka model yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi data panel adalah *Random Effect Model*.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) digunakan untuk meminimalkan distorsi dalam estimasi regresi agar hasilnya mendekati kondisi nyata. OLS merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis regresi linier dan dikenal sebagai estimator terbaik karena bersifat linier dan tidak bias. Oleh karena itu, metode ini sering dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Namun, agar estimasi yang dihasilkan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), model harus lolos uji asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2011). Dalam data panel, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena pengujian ini hanya dilakukan pada data time series, jika dilakukan pengujian pada data selain time series seperti data cross section atau data panel maka hasilnya akan sia-sia atau tidak berarti (Basuki & Prawoto, 2015). Menurut Widarjono (2018), autokorelasi lebih sering menjadi permasalahan pada data time series karena pengamatan dilakukan secara berurutan dalam waktu yang panjang. Sementara itu, pada data panel yang terdiri dari gabungan dimensi waktu dan individu, sifat autokorelasi tidak terjadi secara murni seperti pada data time series. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi data panel, uji asumsi klasik yang diterapkan hanyalah uji Normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berikut adalah penjelasan tentang Uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas menurut Widarjono (2018:101,113):

1) Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Model regresi yang memiliki residual berdistribusi normal dianggap sebagai model yang baik. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera, yang memiliki kriteria sebagai berikut: jika nilai probabilitas lebih besar

dari 0.05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal; sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0.05, maka residual tidak berdistribusi normal

- 2) Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang menyimpang dari asumsi dasar regresi antar variabel independen. Dalam model regresi yang ideal, variabel-variabel bebas seharusnya tidak saling berkorelasi satu sama lain agar hasil estimasi tidak bias dan tetap valid. Untuk mendeteksi masalah ini, digunakan alat uji seperti *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Dalam penelitian ini, multikolinearitas akan dianalisis melalui teknik korelasi parsial antar variabel independen. Umumnya, suatu hubungan antar variabel dikategorikan kuat jika nilai koefisien korelasinya melebihi 0.85. Jika nilai korelasi berada di bawah batas tersebut, maka tidak ditemukan indikasi adanya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, semakin kecil nilai korelasi antar variabel, semakin kecil pula kemungkinan terjadinya multikolinearitas (Widarjono, 2018).

- 3) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah varians residual dalam model regresi bersifat tidak konstan, yang menunjukkan pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians dari error term dianggap sama untuk setiap observasi (Widarjono, 2018). Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah teknik Breusch-Pagan-Godfrey. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis residual dari hasil estimasi dan membandingkan nilai perkalian antara jumlah observasi dengan koefisien determinasi (R-squared) terhadap nilai Chi-Square. Dalam pengujian ini, jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen (Gujarati, 2000 : 130).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Uji t untuk variabel PDRB per kapita
 - $H01: \beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
 - $H_{a1}: \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara PDRB per kapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- 2) Uji t untuk variabel PDRB per kapita kuadrat
 - $H02: \beta_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara PDRB per kapita kuadrat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
 - $H_{a2}: \beta_2 < 0$, terdapat pengaruh negatif signifikan antara PDRB per kapita kuadrat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- 3) Uji t untuk variabel indeks pembangunan manusia (IPM)
 - $H03: \beta_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
 - $H_{a3}: \beta_3 < 0$, terdapat pengaruh negatif signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- 4) Uji t untuk variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
 - $H04: \beta_4 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
 - $H_{a4}: \beta_4 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

5) Uji t untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

- $H_0: \beta_5 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- $H_a: \beta_5 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

6) Uji t untuk variabel Tingkat Kemiskinan

- $H_0: \beta_6 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- $H_a: \beta_6 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Gujarati, 2000 : 257).

- $H_0: \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5; \beta_6 = 0$, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
- $H_a: \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5; \beta_6 \neq 0$, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen menjadi semakin lemah. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, maka model tersebut lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, digunakan Adjusted R^2 karena hasilnya lebih akurat untuk model regresi yang digunakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pemaparan analisis data panel yang dilakukan selama periode 2004–2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **PDRB per Kapita dan PDRB per Kapita Kuadrat (Pengujian Hipotesis Kuznets)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan di Indonesia mengikuti pola kurva U terbalik sebagaimana dijelaskan dalam Hipotesis Kuznets. Artinya, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, ketimpangan mulai menurun. Dengan demikian, Hipotesis Kuznets terbukti relevan untuk konteks Indonesia selama periode pengamatan.

2. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan IPM berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak berperan penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

3. **Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)**

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto memiliki kecenderungan untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan apabila penyebarannya tidak merata

antarwilayah. Dengan kata lain, daerah-daerah yang menjadi pusat akumulasi investasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan pendapatan. Temuan ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap investasi dan infrastruktur sebagai instrumen strategis untuk mengurangi disparitas antarwilayah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Artinya, peningkatan TPT justru diikuti oleh penurunan indeks Gini. Namun demikian, karena arah hubungan yang ditemukan tidak sesuai dengan arah yang diasumsikan dalam hipotesis satu arah yang diajukan, maka secara metodologis hipotesis tersebut ditolak. Temuan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun dan menguji hipotesis satu arah, serta perlunya fleksibilitas dalam menafsirkan hasil empiris yang mungkin tidak sejalan dengan dugaan awal. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan ketimpangan tidak selalu bersifat linear atau searah, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural lain dalam perekonomian.

5. Tingkat Kemiskinan (TK)

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Tingkat Kemiskinan (TK) memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan kata lain, peningkatan kemiskinan justru diikuti oleh penurunan nilai indeks Gini. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis satu arah yang diajukan, yang mengasumsikan bahwa kemiskinan berkontribusi dalam meningkatkan ketimpangan. Oleh karena itu, secara metodologis, hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kemungkinan arah hubungan yang berbeda dari ekspektasi awal dalam proses

perumusan hipotesis. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan bahwa keterkaitan antara kemiskinan dan ketimpangan tidak selalu bersifat linier dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pola distribusi bantuan sosial, struktur lapangan kerja, atau kebijakan fiskal yang berlangsung selama periode penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Antardaerah

Hasil estimasi menunjukkan keberlakuan Hipotesis Kuznets dengan titik balik (turning point) sebesar Rp71,538.69 ribu per kapita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian strategis kepada provinsi-provinsi yang masih berada di bawah titik balik tersebut. Upaya percepatan peningkatan PDRB per kapita hendaknya diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sehingga ketika melewati turning point, ketimpangan pendapatan benar-benar dapat menurun. Intervensi kebijakan dapat berupa pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor unggulan lokal, serta perluasan akses terhadap pasar dan sumber daya produktif.

2. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Merata

Dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, maka diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas SDM secara lebih merata antardaerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas cakupan akses pendidikan, kesehatan, serta pelatihan vokasional guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Prioritas pembangunan manusia hendaknya difokuskan pada provinsi-provinsi dengan capaian IPM yang masih relatif rendah, agar kesenjangan struktural dapat diminimalisasi.

3. Pemerataan Alokasi Investasi Fisik Nasional

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang cenderung terpusat di wilayah ekonomi maju, seperti Jawa dan Sumatera, perlu dialihkan secara proporsional ke wilayah-wilayah lain, khususnya yang belum melampaui turning point. Pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan fiskal dan regulasi investasi yang adaptif melalui pemberian insentif, kemudahan perizinan, serta penguatan iklim usaha di daerah tertinggal guna mendorong distribusi investasi yang lebih seimbang secara geografis.

4. Transformasi Strategi Penanganan Pengangguran

Temuan empiris bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak hanya berperan dalam menurunkan pengangguran, tetapi juga dalam memperkecil disparitas distribusi pendapatan. Oleh karena itu, strategi penanganan pengangguran perlu diarahkan pada penciptaan pekerjaan yang layak, produktif, dan tersebar merata, khususnya di provinsi-provinsi dengan potensi ekonomi menengah yang berada di bawah titik balik, agar dapat mendukung mobilitas ekonomi vertikal masyarakat secara adil.

5. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

Korelasi negatif antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa sebagian daerah mengalami pemerataan dalam kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu mengedepankan strategi berbasis produktivitas, seperti pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penciptaan ekosistem kewirausahaan. Pendekatan ini dipandang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan langsung semata, serta mampu memperkuat fondasi keadilan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

6. Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan metode estimasi panel fixed effect dengan keterbatasan dalam menangani kemungkinan masalah endogenitas. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih robust, seperti Generalized Method of Moments (GMM), guna meningkatkan validitas hasil estimasi. Selain itu, pengayaan variabel kontrol lain seperti indikator kualitas kelembagaan, urbanisasi, atau ketimpangan pendidikan, juga direkomendasikan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, 11(1), 20-28.
- Agus Widarjono. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi keli. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Ahluwalia, M. S. (1976). Inequality, poverty and development. *Journal of development economics*, 3(4), 307-342.
- Alaa, R. D., & Sutikno, S. (2019). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 7(2), 265-272.
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126, 106415.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 628-636.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah. Diakses 12 September 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah). Diakses 12 September 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/ywtoqlrvzznimu5qu1voslrfezfzrtr4vdjotvvumdkjmw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. Diakses 11 Februari 2025 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUljZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>

- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen). Diakses 20 Oktober 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi--persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen). Diakses 27 Maret 2025 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badriah, L. S. (2019, October). Ketimpangan distribusi pendapatan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. In *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage* (Vol. 9, No. 1).
- Breau, S., & Lee, A. (2023). The evolution of the Kuznets curve in Canada. *Papers in Regional Science*, 102(4), 709-736.
- Dai, S. I. S., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 535-544.
- Dogan, N., & Cafri, R. (2016). Which Hypothesis Is Valid in OECD Countries, Kuznets U Curve Or Great U-Turn? System GMM Estimation for Dynamic Panel Data. *Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi*, 25(3), 411-426.
- Ersad, M. (2021). Dampak Ipm, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2019 (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Ekonomi).
- Fauzia, A. A., & Suseno, D. A. (2017). Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), 436-444.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250-265.
- Huang, H. C., Lin, Y. C., & Yeh, C. C. (2012). An appropriate test of the kuznets hypothesis. *Applied Economics Letters*, 19(1), 47-51.

- Hutagalung, S. S., Nizar, M., & Rakhmadi, R. (2024). Menuju Indonesia Emas 2045: Peran Generasi Muda Bidang Sosial, Teknologi, dan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-8.
- Jhungan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Katon Prasetyo Wibowo, & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 539–549.
- Kusumo, B. H. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Maesza, P., Saputro, G. E., & Suwarno, P. (2022). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2000-2019. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 130-140.
- Mankiw, N. Greogory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Martinez-Navarro, D., Amate-Fortes, I., & Guarnido-Rueda, A. (2020). Inequality and development: is the Kuznets curve in effect today?. *Economia Politica*, 37, 703-735.
- Maulidi, N. N., & Sakti, R. K. (2024). Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Fdi Indonesia Dengan Amerika, China, Dan Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 305-319.
- Melikhova, O., & Cizek, J. (2014). Kuznets inverted U-curve hypothesis examined on up-to date observations for 145 countries. *Prague Economic Papers*, 3, 388–410.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37-52.
- Oczki, J., Muszyńska, J., & Wędrowska, E. (2017). *Kuznets Hypothesis Of Income Inequality: Empirical Evidence From Eu*.
- Pramesti, D. A. D. G., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-jurnal ep unud*, 8(11), 2562-2590.
- Sadono Sukirno. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.

- Safrita, S., Abbas, T., & Yurina, Y. (2021). the Effect of Economic Growth and Poverty on Income Inequality in Indonesia. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 4(1), 30-37.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Sasana, H. (2001). *Pengaruh hubungan fiskal pemerintah Pusat-Daerah terhadap produk domestik regional Bruto Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Soekanto, S. S. S., & Siswosoemarto, S. M. (2012). Rubijanto, Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi.
- Syam, A. S. Penerapan Model Isolasi Dalam Analisis Ekonomi Wilayah Perkotaan.
- Shinetiara, T., & Adry, M. R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 25-32.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34-43.
- Syamhari, W. (2023). Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), 23-31.
- Tambunan, T. T. (2001). *Perekonomian Indonesia (Teori dan temuan empiris)*.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Jilid 1. 11 ed. (Terj.) Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Voto, T. P., & Ngepah, N. (2024). Income inequality: The effects of public education expenditure and information and communications technology in sub-Saharan Africa. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27(1), 5647.
- Wardhana, D. (2020). Inequality in Indonesia: Kuznets Waves or Kuznets Curve?. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 168-183.

- Wijayanti, E. S., & Aisyah, S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing, inflasi, dan trade openness terhadap ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 534-540.
- Wulandari, D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh pengeluaran Pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 583-590.
- Yasmin, R., & Syofyan, S. (2024). Determinasi Ketimpangan Pendapatan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia tahun 2019–2023. *Media Ekonomi*, 32(1), 45-60.